INDONESIA EMAS 2045

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

# MUSRENBANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027

**Akhmad Wiyagus**
Wakil Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

**Bandung, 15 April 2026**

# OUTLINE

01 SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

02 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

03 ARAHAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

04 ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

# KONSEPSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



## Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

a. Merupakan **satu kesatuan** dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
**b. Dilakukan pemda bersama** para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
**c. Mengintegrasikan rencana tata ruang** dengan rencana pembangunan Daerah;
d. Dilaksanakan **berdasarkan kondisi dan potensi** yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

## Perumusan dokumen perencanaan daerah

- Transparan
- Responsif
- Efisien
- Efektif
- Akuntabel
- Partisipatif
- Terukur
- Berkeadilan
- Berwawasan lingkungan
- Berkelanjutan

## Pengintegrasian perencanaan dan keuangan daerah

Psl 4 Permendagri 86/2017

Psl 5 Permendagri 86/2017

Permendagri 70/2019 dan 90/2019

**TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH**

*Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.*

# SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

## (Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014)



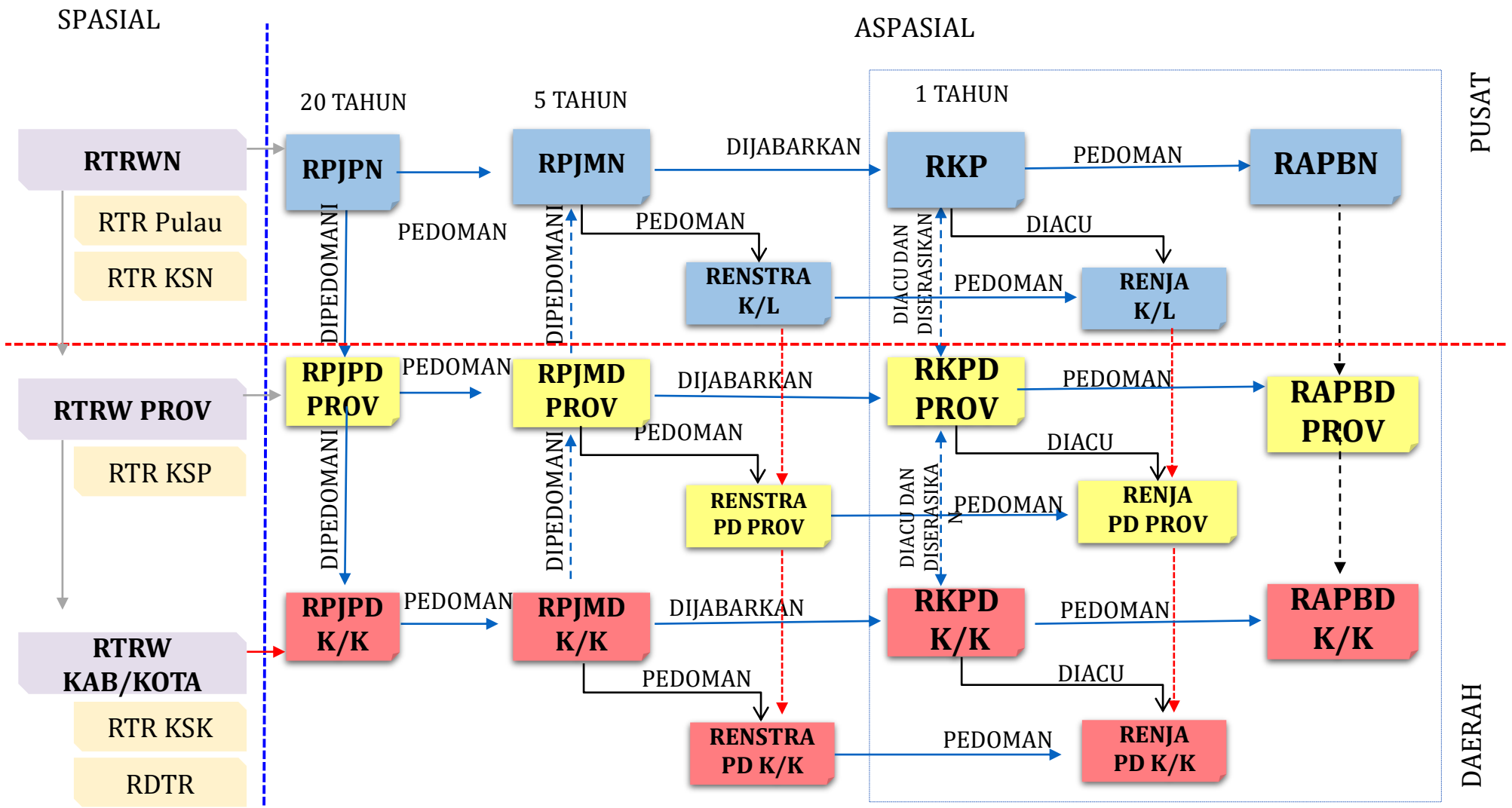


**1. Sikronisasi**

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, terutama menyangkut kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah, dan kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota, serta dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain.

**2. Konsistensi**

Perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan perencanaan anggaran secara konsisten, serta mengutamakan dan mengupayakan konsistensi kinerja antardokumen perencanaan seraya menyelaraskan strategi dan program/kegiatan/subkegiatan untuk mencapai kinerja Pembangunan.

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

# HUBUNGAN KINERJA ANTARDOKUMEN

**RPJPD**

(arah kebijakan dan sasaran pokok)

| Arah & Tahapan Pembangunan Daerah | I (5) | II (10) | III (15) | IV 20) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indikator makro

DITURUNKAN

DIJABARKAN

**RPJMD**

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

| Sasaran, program dan kerangka pendanaan | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Sasaran, program dan kegiatan PD | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Renstra PD**

(Pencapaian Terget Tujuan dan Sasaran)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

**RKPD**

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann RPJMD sesuai Tahun Rencana)

| Program dan kegiatan Pembangunan Daerah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Program dan keg Pemb Daerah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Renja PD**

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann Renstra sesuai Tahun Rencana)

# PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

**VISI 2025 – 2029**

**" JABAR ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS KOTA DITATA"**

**MISI 2025 – 2029**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

**TEMA RKP NASIONAL TAHUN 2027**

**"AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKUALITAS MELALUI PRODUKTIVITAS, INVESTASI, DAN INDUSTRI"**

**TEMA RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027**

**"PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN BERBASIS PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN"**

*Sumber: Perda 3 Tahun 2025 RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029*

# REKOMENDASI KEBIJAKAN TERHADAP ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

**6 Isu Strategis**
**RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029**

1) *Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif*
2) *Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*
3) *Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar*
4) *Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan*
5) *Keberlanjutan Penataan Ruang*
6) *Kualitas Tata Kelola Pemerintahan*

**Diolah dan diselaraskan dengan Rancangan RKP 2027, RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Jawa Barat 2025-2029*

# KONSEP KESELARASAN DUKUNGAN DAERAH TERHADAP TARGET NASIONAL



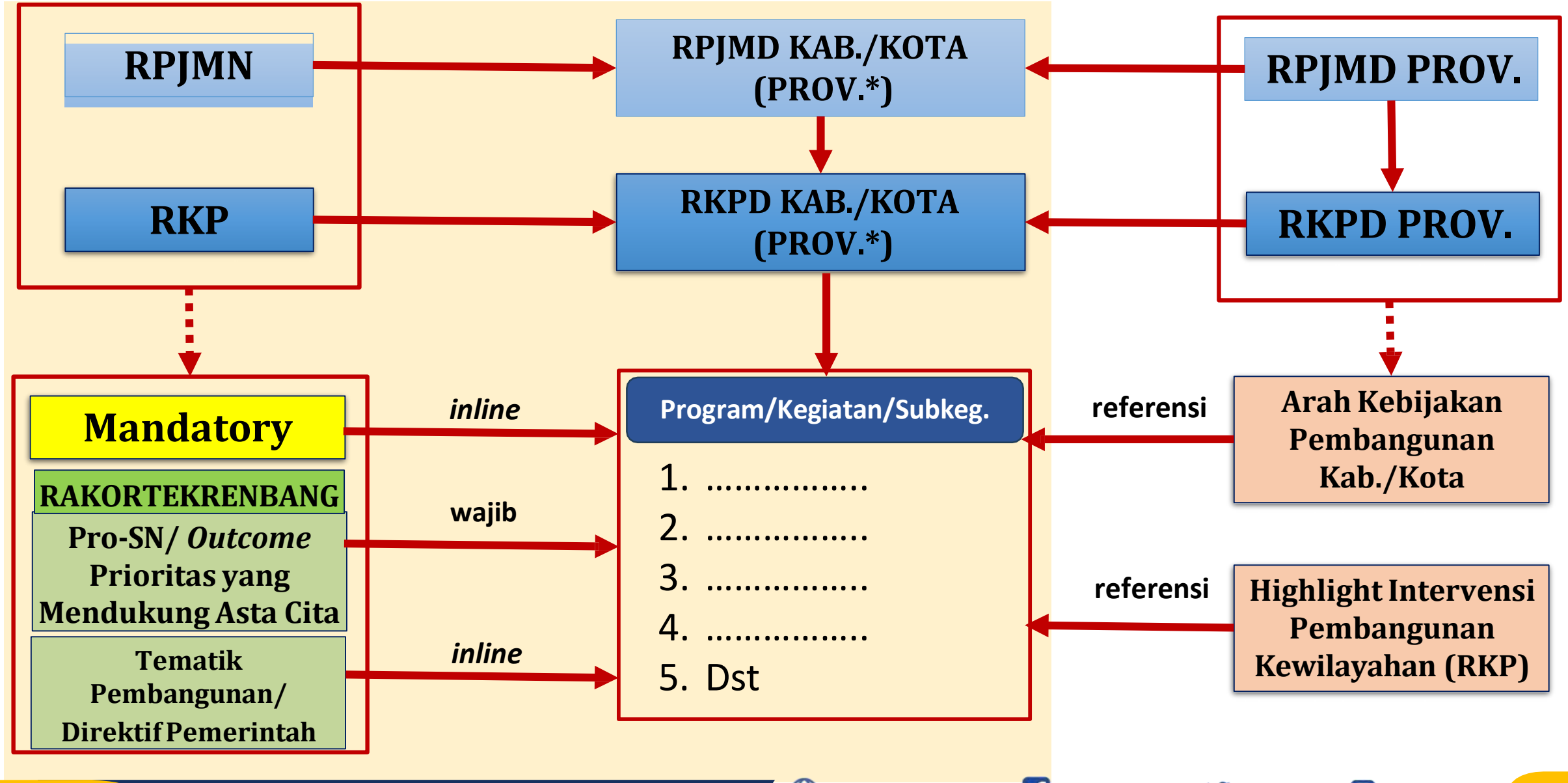

# RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

## SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (SICC), KAB. BOGOR , 2 FEBRUARI 2026

Total Jumlah Peserta Rakornas

**4.011**

Orang

Peserta **Instansi Pusat** : **525**

Peserta **Instansi Daerah** : **3.486**

1.013 Orang KDH dan WKDH
464 Orang DPRD, DPRA, DPRP, dan DPRK
486 Orang Jajaran TNI Tingkat Provinsi & Kab/Kota
480 Orang Jaajran Polri Tingkat Provinsi & Kab/Kota
425 Orang Jajaran Kejaksaan Tingkat Provinsi & Kab/Kota
36 Orang Jajaran Kabinda Tingkat Provinsi & Kab/Kota
34 Orang Jajaran BI Tingkat Provinsi & Kab/Kota
548 Orang Jajaran BPS Tingkat Provinsi & Kab/Kota

**Presiden dan Wapres, Menko, Wamenko Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih**, Ketua DEN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kabin, Pimpinan Wakil Pimpinan Lembaga, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Eselon I K/L, Perwakilan Pejabat Utama Mabes TNI, Mabes Polri, Mabes AD, AL & AU, KDH dan Wakil KDH, DPRD, DPRA, DPRP Provinsi dan Kab/Kota, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPS

**Poin utama Rakornas:**

1. **Ketahanan Pangan dan Energi. Pemerintah menargetkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan cadangan nasional, serta mendorong kemandirian energi melalui optimalisasi sumber energi dalam negeri dan percepatan transisi energi.**
2. **Peningkatan Kualitas SDM.** Dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis untuk deteksi dini, serta penguatan pendidikan termasuk Sekolah Rakyat dan digitalisasi pembelajaran.
3. **Penguatan Ekonomi Nasional.** Fokus pada pengembangan koperasi desa/kelurahan, hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
4. **Pembangunan Berbasis Wilayah dan Lingkungan.** Dilaksanakan melalui pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih untuk ketahanan protein laut, serta Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) termasuk pembangunan waste to energy dan penanganan sampah terpadu.
5. **Pengentasan Kemiskinan.** Dilakukan melalui integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih berkelanjutan.
6. **Penguatan Politik Luar Negeri.** Menjalankan politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat kerja sama internasional di bidang perdagangan dan keamanan.

**Rakornas bertujuan untuk memberikan arahan strategis dan memastikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Nasional yang dirumuskan dalam Asta Cita sebagai landasan bagi Indonesia Emas 2045.**

# ARAHAN PRESIDEN PADA RAKORNAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

## ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH

**Presiden Prabowo Subianto** menyampaikan arahan kepada jajaran pemerintahan pusat dan daerah mencakup kebijakan strategis menuju **Indonesia Emas 2045** dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2), seperti berikut.

"Indonesia harus kuat. Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia. Kita mau menjadi negara maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik."

— Presiden Prabowo Subianto

### 1 Ketahanan Pangan dan Energi

**Swasembada Pangan.** Peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional.

**Swasembada Energi:** Optimalisasi sumber energi dalam negeri serta percepatan transisi dan kemandirian energi.

### 2 Peningkatan Kualitas SDM

**Makan Bergizi Gratis (MBG)**
Peningkatan kualitas gizi dengan target 82.9 juta penerima pada 2026.

**Cek Kesehatan Gratis (CKG)**
Deteksi dini dan penguatan layanan kesehatan daerah.

### 3 Penguatan Ekonomi

**Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**
Penggerak ekonomi desa dan kelurahan.

**Hilirisasi.** Peningkatan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan industri.

**Pertumbuhan Inklusif**
Investasi dan penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM.

### 4 Pembangunan Berbasis Wilayah dan Lingkungan

**Kampung Nelayan Merah Putih**
Pembentukan 1.100 kampung nelayan untuk mendorong swasembada protein laut.

**Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)**
- Pelaksanaan 34 proyek "waste to energy" di 34 kota dengan investasi hampir 3.5 miliar dolar AS...

**Penanganan** sampah nasional terpadu.

### 5 Pengentasan Kemiskinan

Integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

### 6 Politik Luar Negeri

Politik bebas aktif serta penguatan kerja sama perdagangan dan keamanan.

Sumber: ntvnews.id

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

# CAPAIAN INDIKATOR MAKRO 2021-2025
# PROV. JAWA BARAT

## IPM

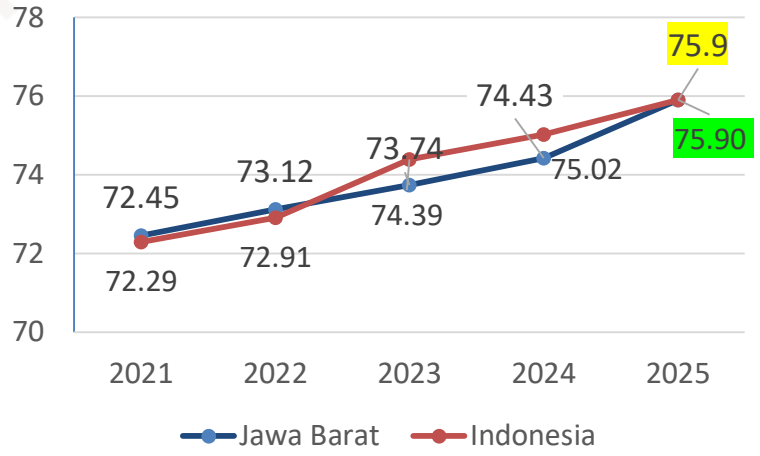


## LPE (%)

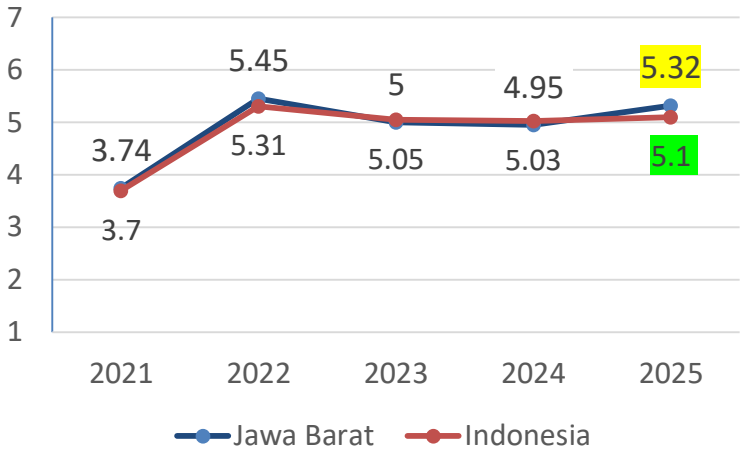


## TPT (%)

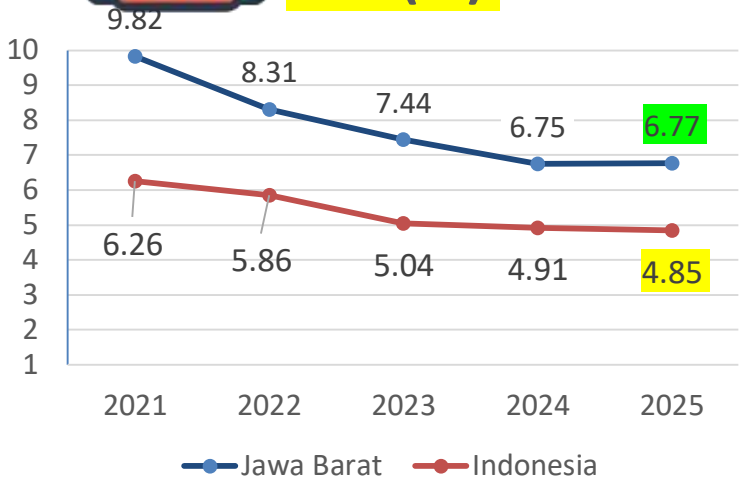


Secara umum, kinerja makro Jawa Barat pada periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif pada ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara konsisten mengalami peningkatan***, mencapai angka 75,9 setara denga capaian nasional. Selanjutnya, ***Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 6,77 pada tahun 2025 yang masih berada bawah rata-rata nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.32% berada di atas rata-rata nasional.***
Namun demikian, capaian impresif pada kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi ini masih menyisakan tantangan strategis pada aspek ketenagakerjaan, di mana ***Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*** Jawa Barat ***(6,77,%) masih tercatat lebih tinggi dibandingkan angka nasional (4,85%),*** mengindikasikan bahwa laju ekonomi saat ini belum sepenuhnya inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Penurunan TPT dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan akses informasi dan bursa kerja, dan sebagainya.

*Sumber : BPS Jabar Tahun 2026*

# CAPAIAN INDIKATOR MAKRO 2021-2025
# PROV. JAWA BARAT

## Gini Rasio

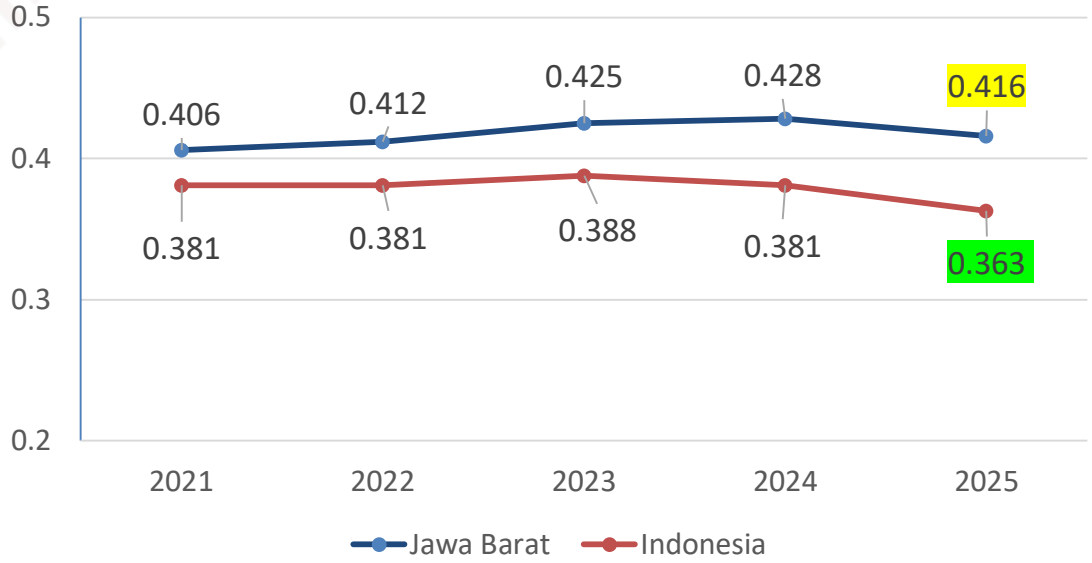


## Penduduk Miskin (%)

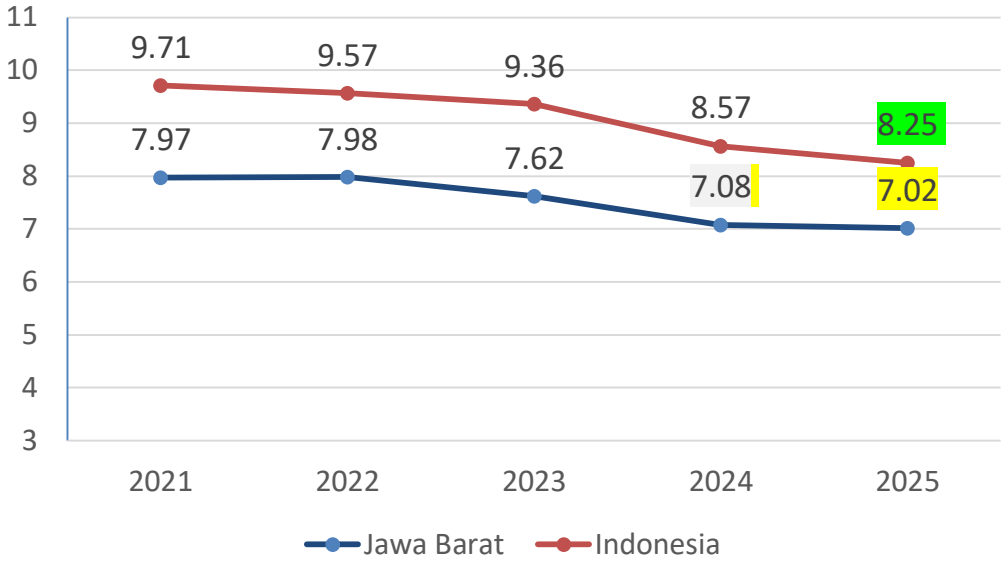


Kinerja pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan yang cenderung positif sepanjang periode 2021–2025, ditandai dengan ***angka kemiskinan yang secara konsisten selalu berada di bawah rata-rata nasional yakni pada tahun 2025 capaiannya sebesar 7,02%.*** Sementara capaian gini rasio tahun 2025 dibandingkan dengan nasional, masih perlu mendapatkan perhatian dengan angka gini rasio yang cukup tinggi sebesar 0,416 yang mengindikasikan cukup tingginya ketimpangan di Provinsi Jawa Barat. Penurunan kedua indikator makro yang berjalan beriringan ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah perlu memperhatikan inklusifitas, sehingga hasil pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

*Sumber : BPS Tahun 2026*

# Tingkat Kemiskinan September 2025

**Persentase Penduduk Miskin (P0) Indonesia Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) September Tahun 2025**

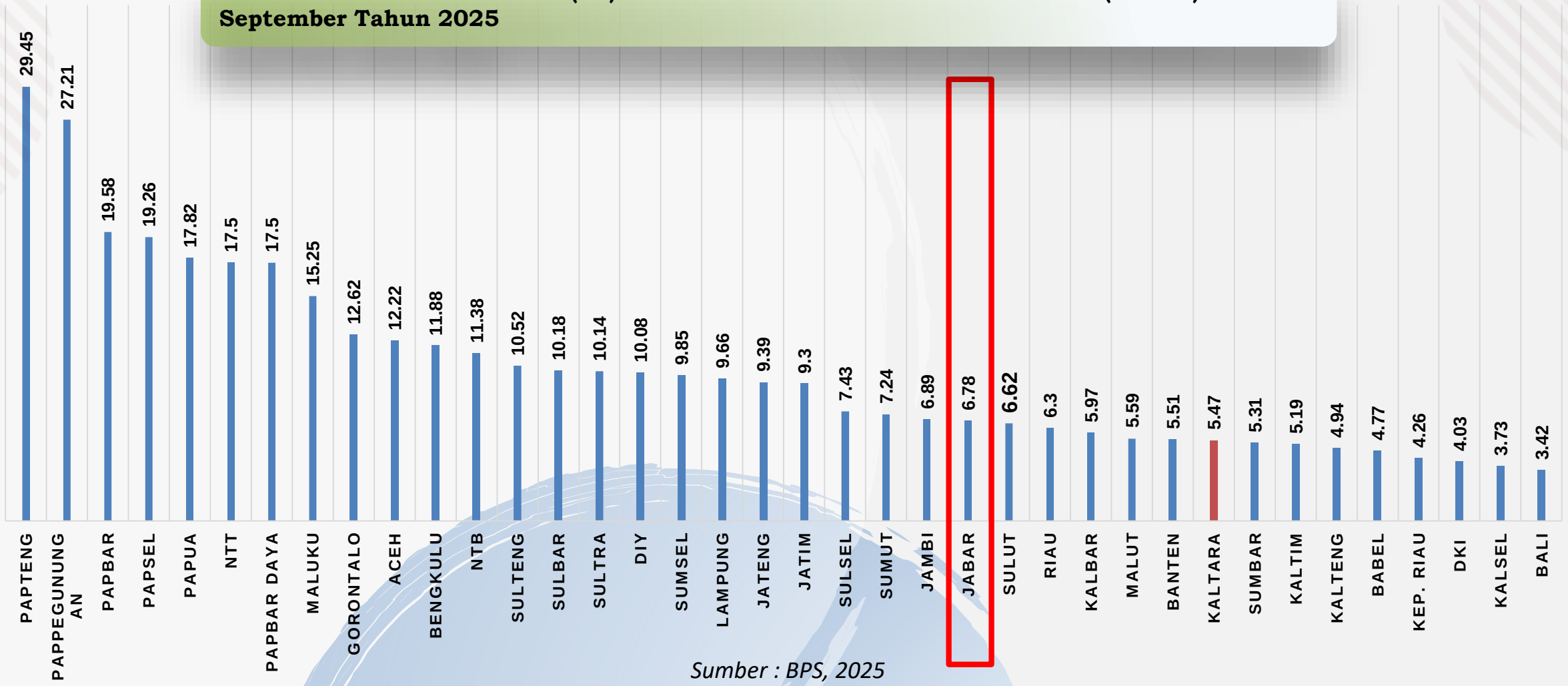


*Sumber : BPS, 2025*

Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 6,78 persen. Persentase Penduduk Miskin ($P_0$) tertinggi Adalah Provinsi Papua Tengah yaitu 29,45 persen. Sedangkan Persentase kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali berada pada angka 3,42 %

**Kementerian Dalam Negeri**
Republik Indonesia

# Persentase Perbandingan Target Pengentasan Kemiskinan (RPJMD) dengan Persentase Angka Kemiskinan Berdasarkan Susenas BPS (September Tahun 2025)

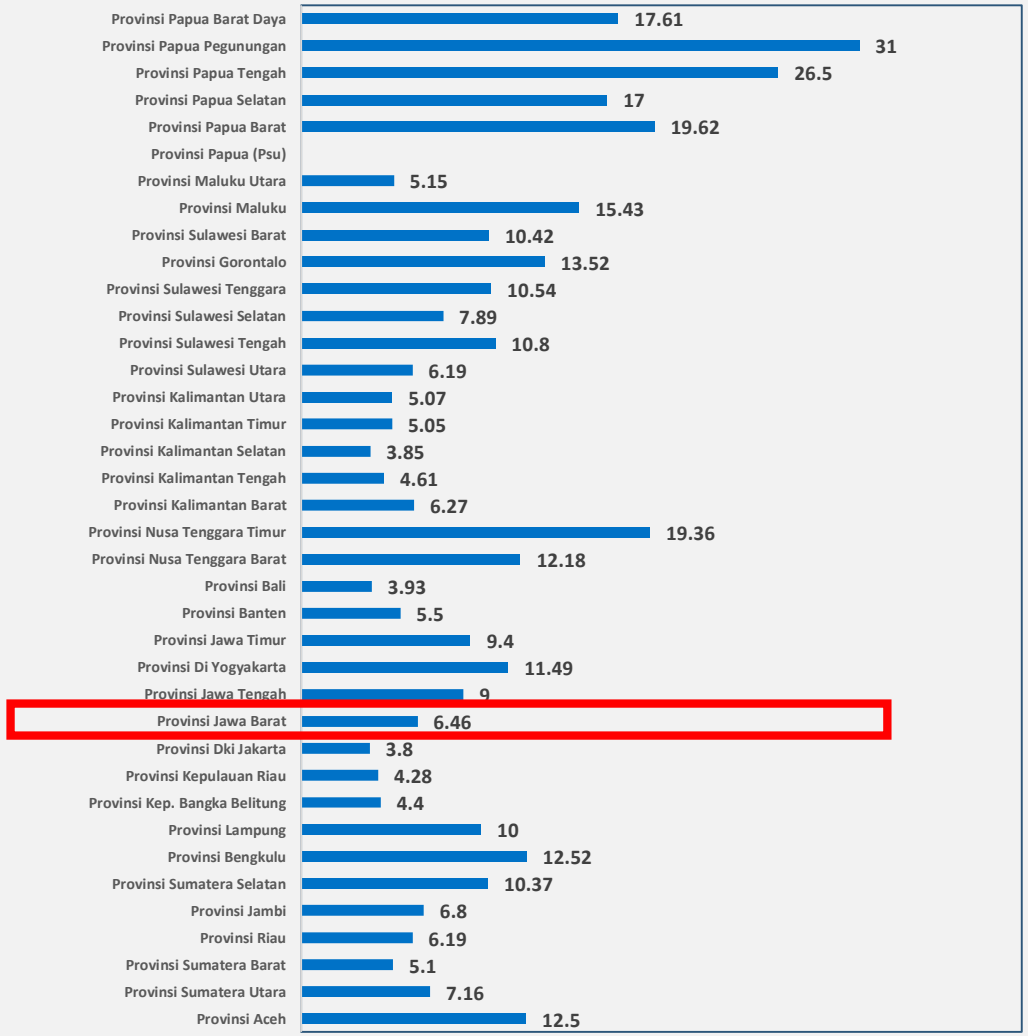


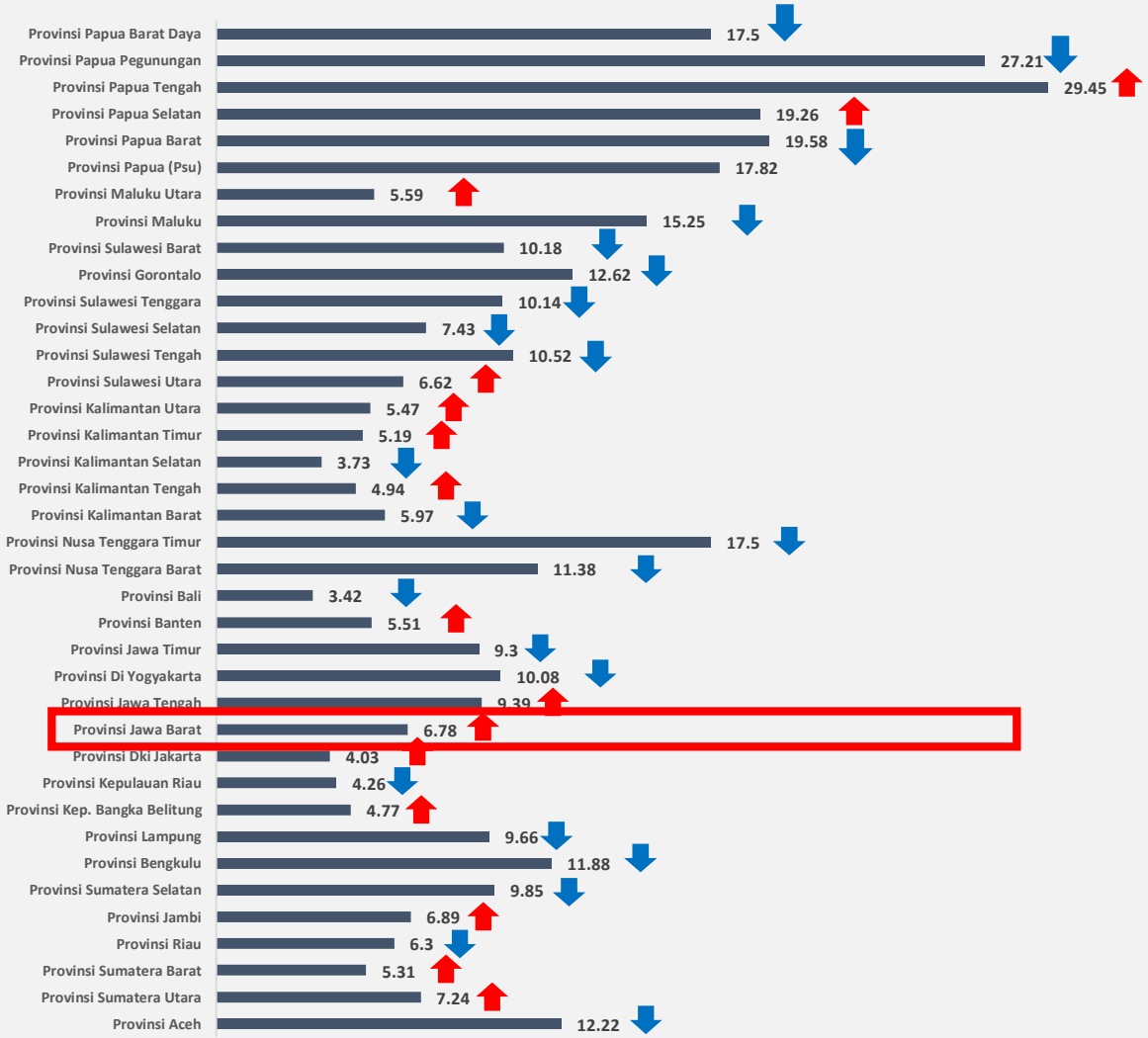


**Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi**

**Sumber : Susenas BPS September, 2025**

**18 Provinsi**
**Di atas Target Pengentasan Kemiskinan RPJMN (2025)**
**8,47 %**

**19 Provinsi**
**Di bawah Target Pengentasan Kemiskinan RPJMN (2025)**
**8,47 %**

**1 Provinsi**
**Data RPJMD nya belum terdapat dalam SIPD RI**

**15 Provinsi**
**Terjadi kenaikan persentase angka kemiskinan di atas target RPJMD Provinsi**

**22 Provinsi**
**Berrhasil menurunkan persentase angka kemiskinan Di bawah Target Pengentasan Kemiskinan RPJMD Provinsi**

**1 Provinsi**
**Belum terdapat targwt kemiskinan yang dituangkan dalam RPJMD**

# PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BEBERAPA NEGARA DUNIA DENGAN INDONESIA PER TRIWULAN IV TAHUN 2025 (*Y-ON-Y*)

## Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara di Dunia Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %

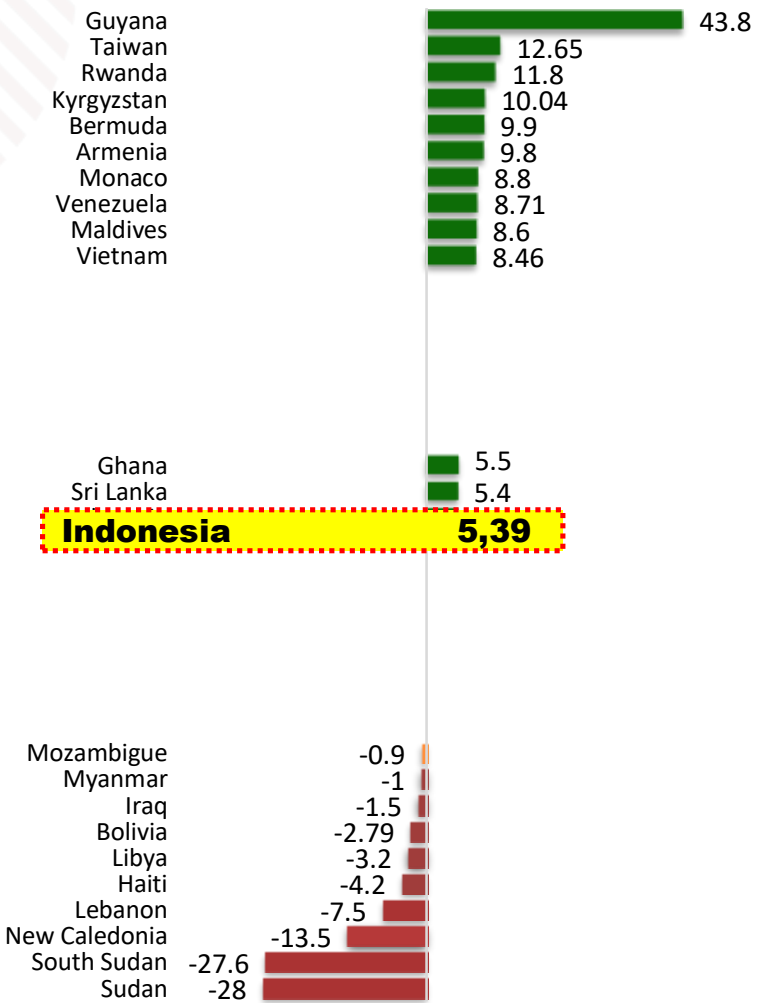


## Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara G20 Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %

**Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia**
**Peringkat 3 dari 24 negara G20**
*(Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)*

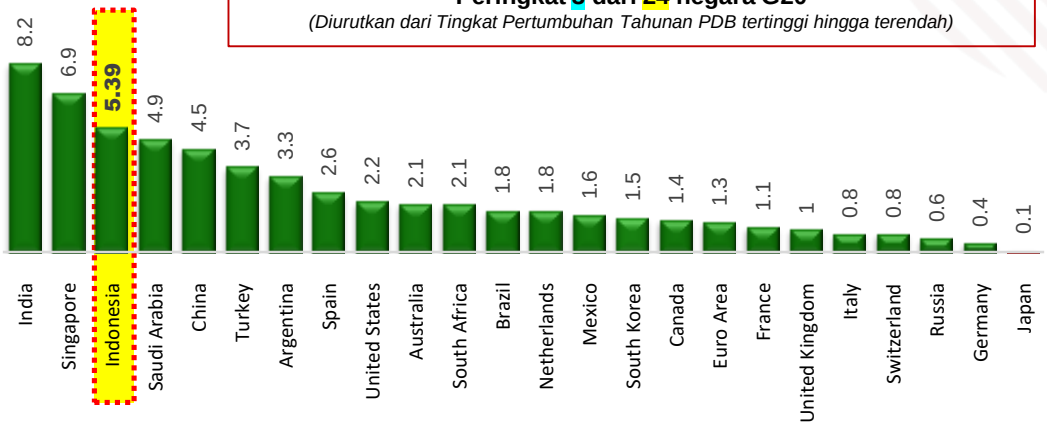


## Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %

**Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia**
**Peringkat 5 dari 11 negara ASEAN**
*(Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)*

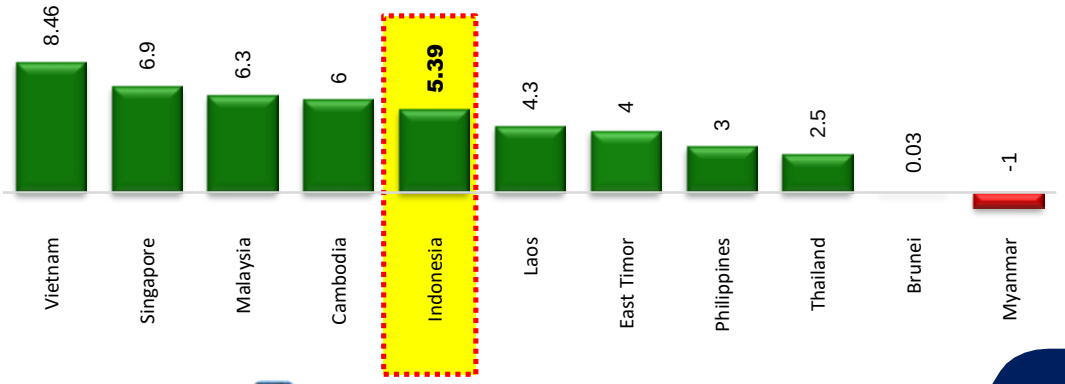


*Sumber: https://tradingeconomics.com/ dan BPS, diolah 22 Februari 2026*

# EKONOMI INDONESIA 2025 TUMBUH 5,11% (SEPANJANG TAHUN 2025)

Ekonomi Indonesia tumbuh 5.39 persen (y-on-y) pada Triwulan 4-2025 dan **5,11 persen sepanjang tahun 2025.**

**Pertumbuhan Ekonomi**
**Sepanjang Tahun 2025 Per Provinsi**

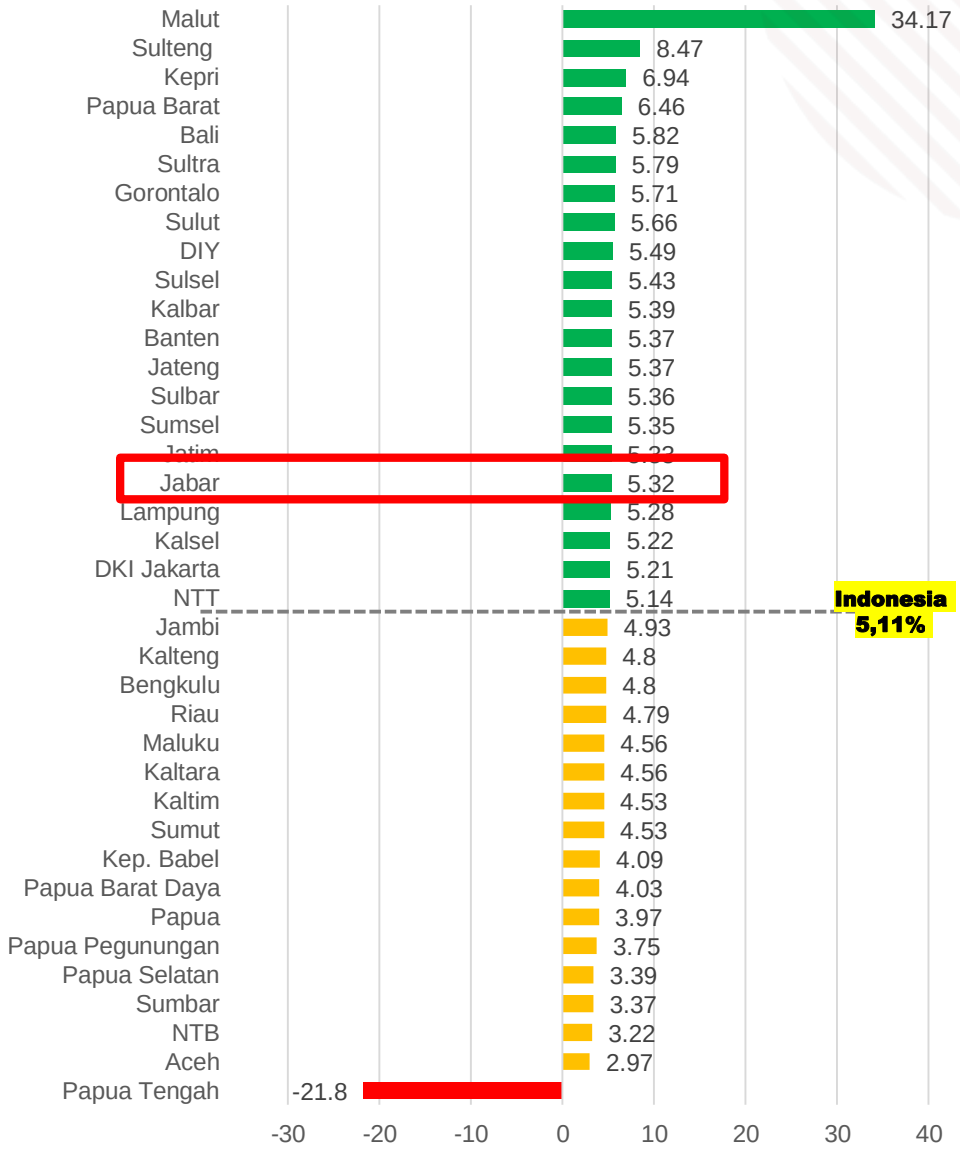


*Sumber: BPS, 5 Februari 2026*

# PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV TAHUN 2025 *(y-o-y)*

## Triwulan IV 2025 (*y-on-y*): 5,39%

**Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen (y-on-y) pada Triwulan 4-2025** dan 5,11 persen sepanjang tahun 2025.

## Kontribusi (*Share*) Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pulau TW IV-2025

Secara spasial, **pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Sulawesi.** Sepanjang tahun 2025, wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

## Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2025 Per Provinsi *(y-on-y,%)*

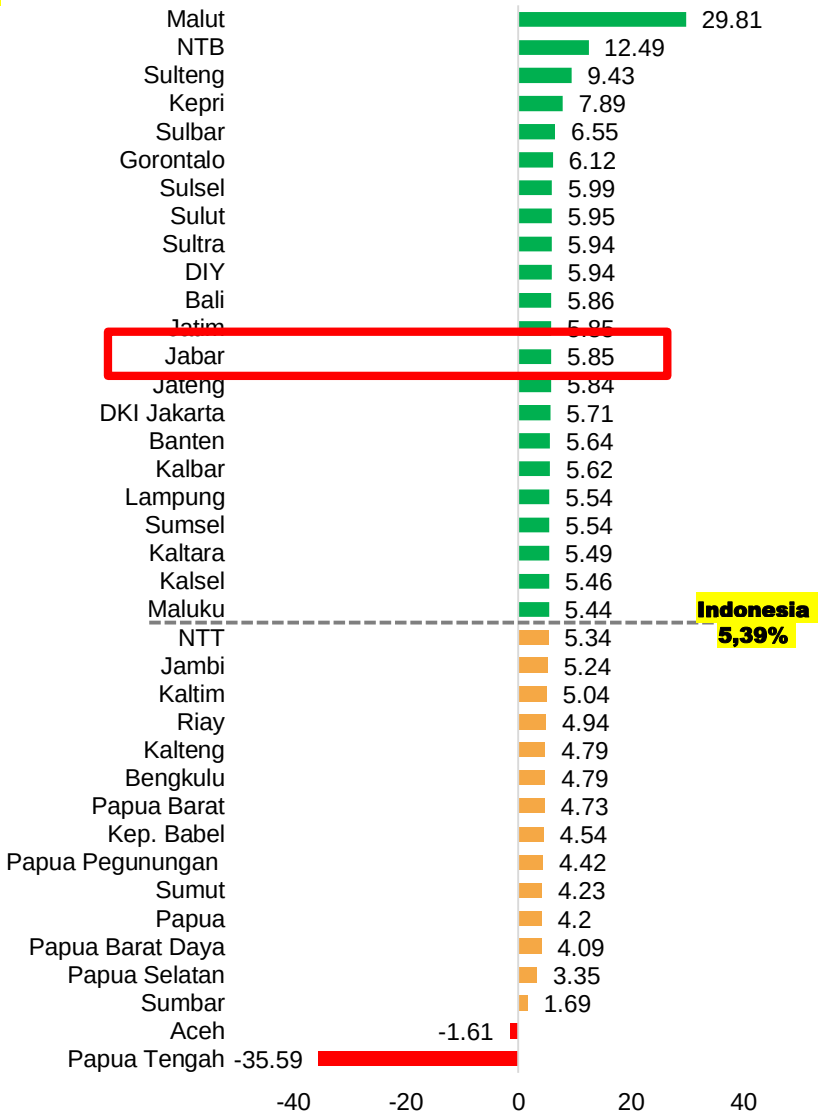


## Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha TW IV-2025 *(y-on-y)*

**Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan IV-2025 (y-on-y)**

**Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar** terhadap ekonomi, yakni **Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan**.

Lapangan usaha dengan **pertumbuhan tinggi**, yaitu:

1. **Transportasi & Pergudangan** tumbuh didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan Libur Nataru dan kebijakan stimulus diskon tarif angkutan.
2. **Informasi & Komunikasi** tumbuh didukung oleh peningkatan aktivitas pengguna internet dan peningkatan *traffic* data operator seluler.
3. **Jasa Keuangan** tumbuh ditopang oleh pertumbuhan kredit dan pendapatan premi asuransi.

*Sumber: Rilis BPS 5 November 2025, diolah 22 Februari 2026*

# TREN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I, II, III, dan IV TAHUN 2025 *(y-o-y)*

**Pertumbuhan Ekonomi TW I 2025 Per Provinsi *(y-on-y,%)***

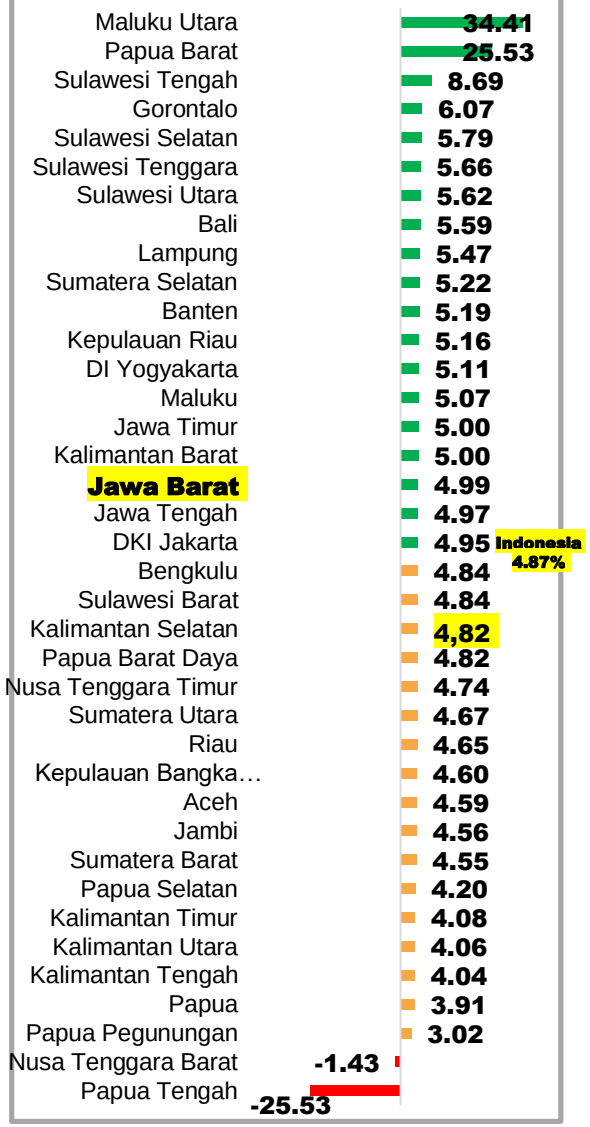


**Pertumbuhan Ekonomi TW II 2025 Per Provinsi *(y-on-y,%)***

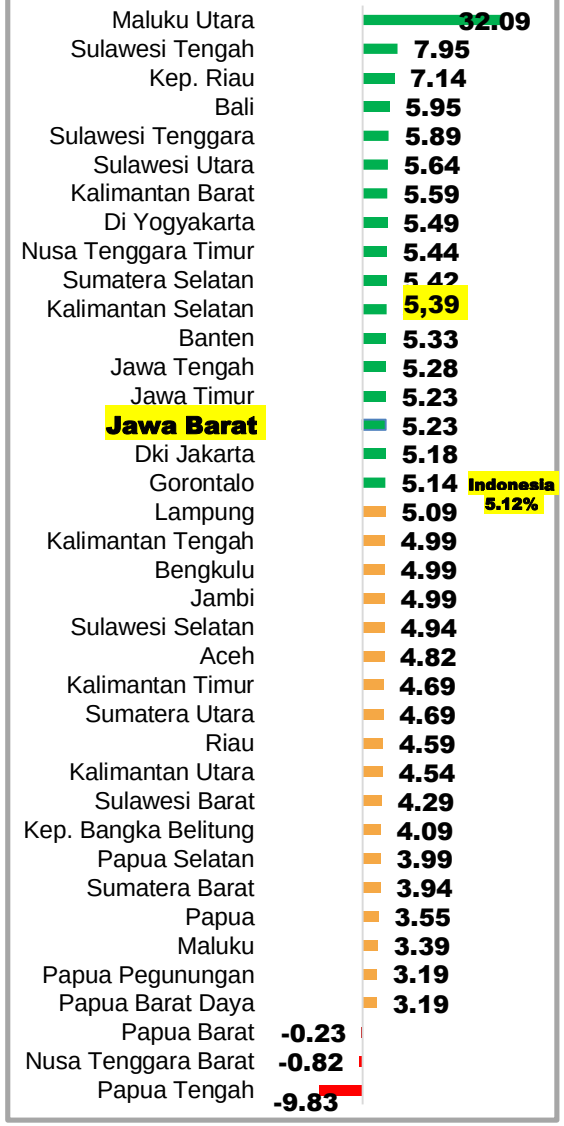


**Pertumbuhan Ekonomi TW III 2025 Per Provinsi *(y-on-y,%)***

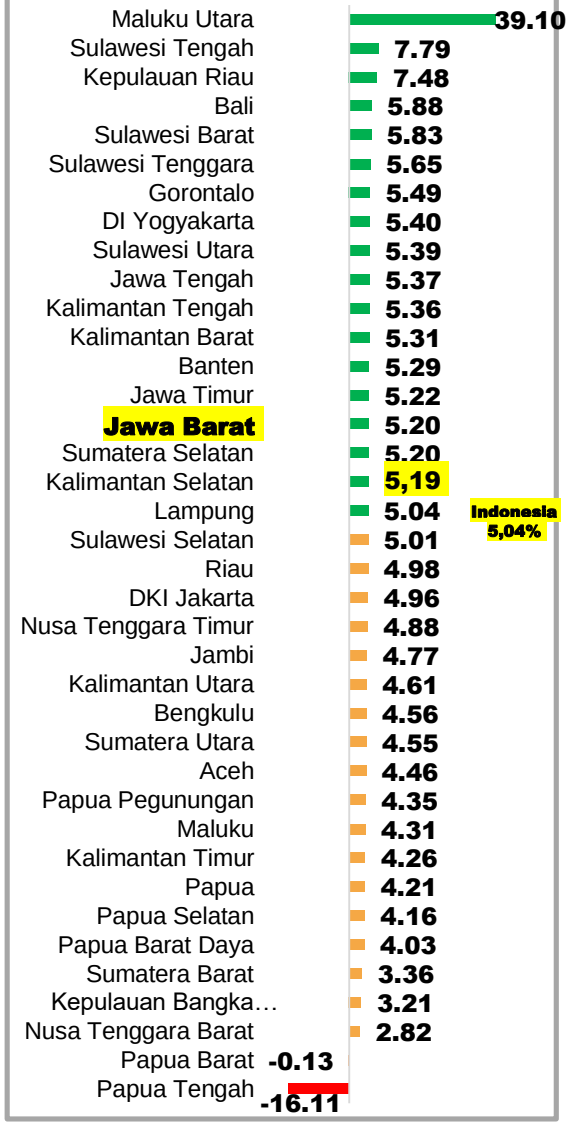


**Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2025 Per Provinsi *(y-on-y,%)***

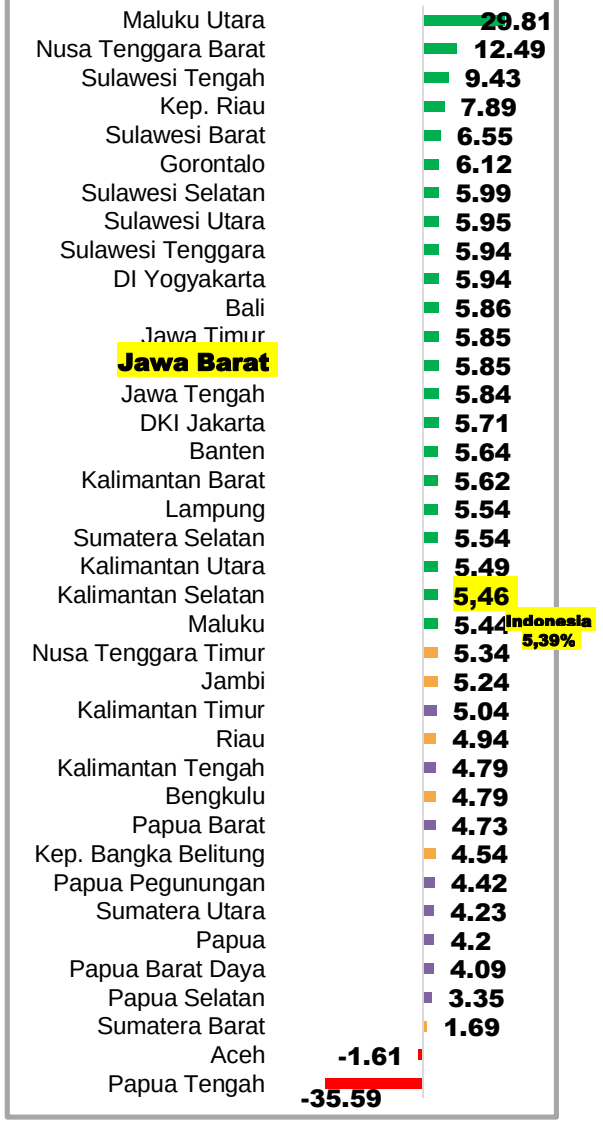


*Sumber: BPS, diolah 22 Februari 2026*

# PEMERINTAH DAERAH YANG SUDAH MELAPORKAN KEGIATAN WEBSITE *kendaliekonomi.kemendagri.go.id*

## BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO. 000.4.6/3764/SJ TANGGAL 11 JULI 2025 HAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

**Rekap Jumlah Pemda yang sudah mengisi berdasarkan 9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:**

| No | Langkah Konkrit | Jumlah Pemda Provinsi dan Kab/Kota Minggu Ke-I Maret 2026 | Jumlah Pemda Provinsi dan Kab/Kota Minggu Ke-II Maret 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Percepatan Realisasi APBD | 320 | 322 |
| 2 | Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 242 | 242 |
| 3 | Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Pemerintah | 255 | 258 |
| 4 | Pengendalian Harga Bahan Pokok | 0 | 0 |
| 5 | Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal | 174 | 174 |
| 6 | Perluasan Kesempatan Kerja | 228 | 229 |
| 7 | Produktivitas Sektor Pertanian/Perkebunan/ Perikanan/ Peternakan | 254 | 255 |
| 8 | Industri Manufaktur | 261 | 261 |
| 9 | Mempermudah Perizinan Berusaha | 277 | 278 |

*Sumber : kendaliekonomi.kemendagri.go.id, diakses 07 Maret 2026*

**Rekap Jumlah Pemda yang sudah melaksanakan Detail 9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:**

**341** Pemda Sudah Melaporkan 9 Langkah Konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

**29** : Provinsi **244** : Kabupaten **68** : Kota

| No | Detail Langkah Konkrit | Jumlah Pemda Provinsi dan Kab/Kota |
|---|---|---|
| 1 | APBD Belanja Bansos | 286 |
| 2 | APBD Belanja Barjas | 304 |
| 3 | APBD Belanja Modal | 299 |
| 4 | APBD Belanja Pegawai | 319 |
| 5 | APBD Pendapatan | 298 |
| 6 | PMA Fasilitas Kawasan | 86 |
| 7 | PMA Investasi | 199 |
| 8 | PMA Kawasan | 114 |
| 9 | PMA Subsidi | 123 |
| 10 | PMA Tenaga Kerja | 143 |
| 11 | Infra Belanja | 230 |
| 12 | Infra DPA | 113 |
| 13 | Infra Energi | 111 |
| 14 | Infra Jangkau Energi | 102 |
| 15 | Infra Logistik | 75 |
| 16 | Infra PSN | 111 |
| 17 | Ekspor Pengawasan | 161 |

| No | Detail Langkah Konkrit | Jumlah Daerah Provinsi dan Kab/Kota |
|---|---|---|
| 18 | Ekspor Satgas | 136 |
| 19 | Kerja Kesempatan | 221 |
| 20 | Kerja Kebijakan | 131 |
| 21 | Produktifitas Kebijakan | 245 |
| 22 | Produktifitas Kemitraan | 173 |
| 23 | Produktifitas Peningkatan | 225 |
| 24 | Industri Izin | 71 |
| 25 | Industri Pariwisata | 218 |
| 26 | Industri Produk | 162 |
| 27 | Industri Sertifikat | 208 |
| 28 | Izin Keluhan | 233 |
| 29 | Izin MPP | 210 |
| 30 | Izin Hasil | 211 |
| 31 | Izin Tim | 219 |
| 32 | Izin RDTR | 217 |
| 33 | Izin Standar | 221 |

Keterangan
PMA : Penanaman Modal Asing
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
PSN : Proyek Strategis Nasional
MPP : Mall Pelayanan Publik
RDTR : Rencana Detail Tata Ruang

# PEMERINTAH DAERAH YANG SUDAH MENGISI DATA PROFIL WEBSITE *kendaliekonomi.kemendagri.go.id*

## BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO. 000.4.6/3764/SJ TANGGAL 11 JULI 2025 HAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

**Rekap Jumlah Pemda yang sudah mengisi berdasarkan Data Profil Pertumbuhan Ekonomi:**

| No | Data Profile | Jumlah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Minggu Ke-I Maret 2026 | Jumlah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Minggu Ke-II Maret 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembentukan Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 359 | 359 |
| 2 | Potensi Wilayah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 250 | 250 |
| 3 | Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 296 | 297 |
| 4 | Diagnosis Kendala Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 185 | 185 |

**Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang sudah mengisi Data Profil Pertumbuhan Ekonomi:**

**385** Pemda Sudah Mengisi Data Profil Pertumbuhan Ekonomi Daerah

| | | |
|---|---|---|
| **30** | : | **Provinsi** |
| **77** | : | **Kota** |
| **278** | : | **Kabupaten** |

*Sumber : kendaliekonomi.kemendagri.go.id, diakses 07 Maret 2026*

# PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI DI BEBERAPA NEGARA DUNIA DENGAN INDONESIA PER MARET 2026 (*Y-ON-Y*)

**Tingkat Inflasi di Beberapa Negara di Dunia Per Maret 2026 (Y-on-Y) %**

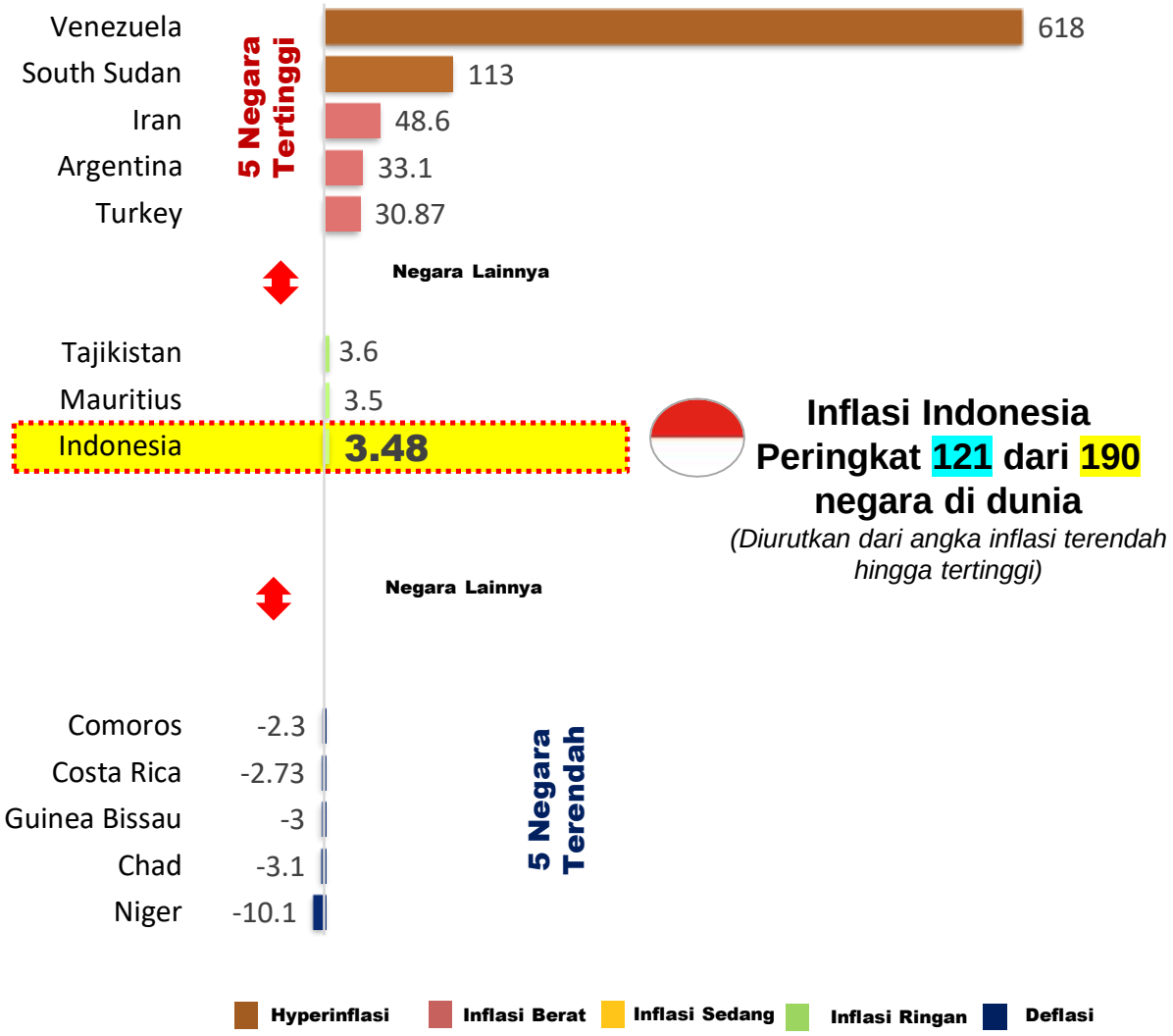


**Inflasi Indonesia Peringkat 121 dari 190 negara di dunia**

*(Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)*

**Tingkat Inflasi di Negara-Negara G20 Per Maret 2026 (Y-on-Y) %**

**Inflasi Indonesia Peringkat 18 dari 24 negara G20**

*(Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)*

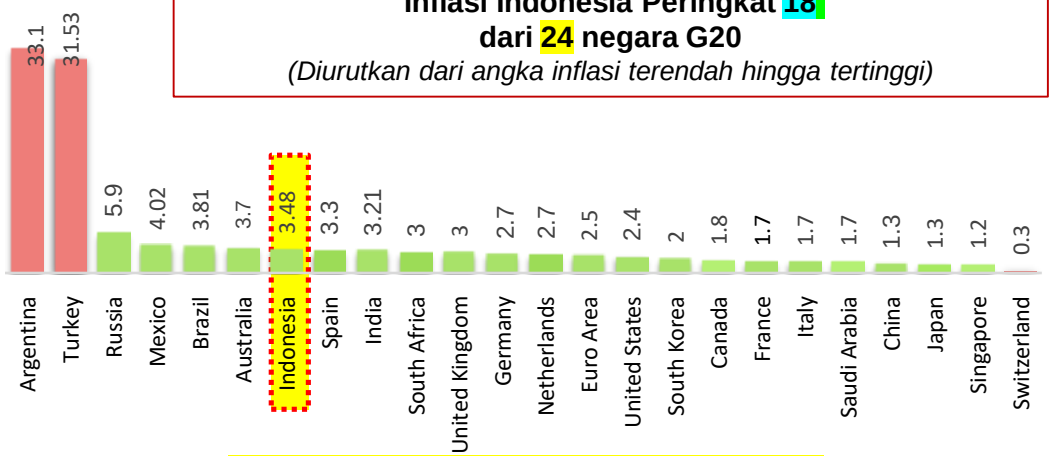


**Tingkat Inflasi di Negara-Negara ASEAN Per Maret 2026 (Y-on-Y) %**

**Inflasi Indonesia Peringkat 8 dari 11 negara ASEAN**

*(Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)*

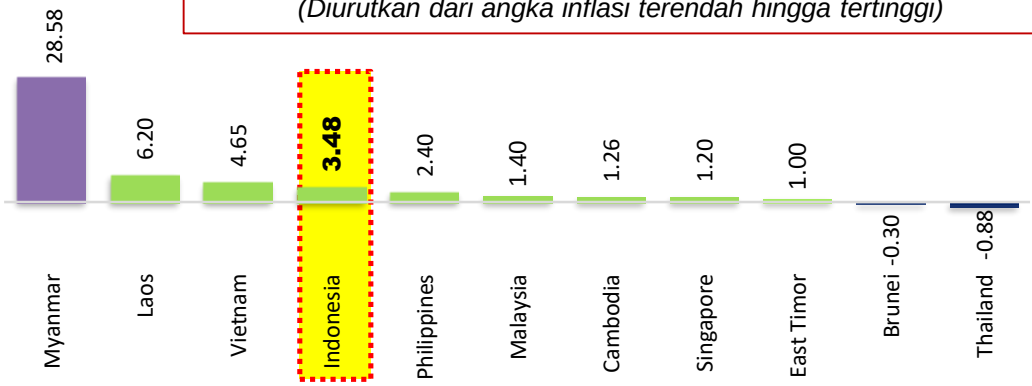


*Sumber: https://tradingeconomics.com/ dan BPS, Per 5 April 2026*

# PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL PER MARET 2026

## Inflasi Tahun ke Tahun
*(Maret 2026 terhadap Maret 2025)*

**3,48%**

### Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (%)

**Sumber**: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | | | | | | | | 2026 | |
| y-on-y | 0,76 | -0,09 | 1,03 | 1,95 | 1,60 | 1,87 | 2,37 | 2,31 | 2,65 | 2,86 | 2,72 | 2,92 | 3,55 | 4,76 | 3,48 |

### Inflasi Berdasarkan Kelompok (*y-on-y*, %)

**Sumber**: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

| | Rincian | Inflasi | Andil Inflasi |
|---|---|---|---|
| | **Inflasi Umum** | **3,48** | **3,48** |
| **1.** | **Makanan, Minuman, dan Tembakau** | **3,34** | **0,99** |
| 2. | Pakaian dan Alas Kaki | 0,65 | 0,03 |
| **3.** | **Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** | **7,24** | **1,08** |
| 4. | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,24 | 0,01 |
| 5. | Kesehatan | 1,49 | 0,05 |
| 6. | Transportasi | 0,61 | 0,08 |
| **7.** | **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan** | **-0,03** | **~0** |
| 8. | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 1,08 | 0,02 |
| 9. | Pendidikan | 1,14 | 0,06 |
| 10. | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 1,42 | 0,14 |
| **11.** | **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** | **15,32** | **1,02** |

Inflasi tahunan Maret 2026 **lebih tinggi** dibandingkan inflasi tahunan Maret 2025.

**Keterangan**: ~0 bernilai sangat kecil

**Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (*y-on-y*, %)**

## Inflasi Bulan ke Bulan
*(Maret 2026 terhadap Februari 2026)*

**0,41%**

**Inflasi Tahun Kalender**
*(Maret 2026 terhadap Desember 2025)*

**0,94%**

### Perkembangan Inflasi Bulan ke Bulan (%)

**Sumber**: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | | | | | | | | 2026 | |
| m-to-m | -0,76 | -0,48 | 1,65 | 1,17 | -0,37 | 0,19 | 0,30 | -0,08 | 0,21 | 0,28 | 0,17 | 0,64 | -0,15 | 0,68 | 0,41 |

### Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (*m-to-m*, %)

**Sumber**: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

| | Rincian | Inflasi | Andil Inflasi |
|---|---|---|---|
| | **Inflasi Umum** | **0,41** | **0,41** |
| **1.** | **Makanan, Minuman, dan Tembakau** | **1,07** | **0,32** |
| 2. | Pakaian dan Alas Kaki | 0,37 | 0,02 |
| 3. | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0,09 | 0,01 |
| 4. | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,04 | ~0 |
| 5. | Kesehatan | 0,10 | ~0 |
| **6.** | **Transportasi** | **0,41** | **0,05** |
| 7. | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 0,06 | ~0 |
| 8. | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 0,16 | ~0 |
| 9. | Pendidikan | 0,03 | ~0 |
| 10. | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 0,17 | 0,02 |
| **11.** | **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** | **-0,21** | **-0,01** |

Terjadi **inflasi** di Maret 2026 yang lebih rendah dari pada bulan sebelumnya.

**Keterangan**: ~0 bernilai sangat kecil

**Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (*m-to-m*, %)**

*Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, Rilis 1 April 2026*

# KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA

## BULAN MARET 2026

### Inflasi Per-Provinsi (y-o-y)

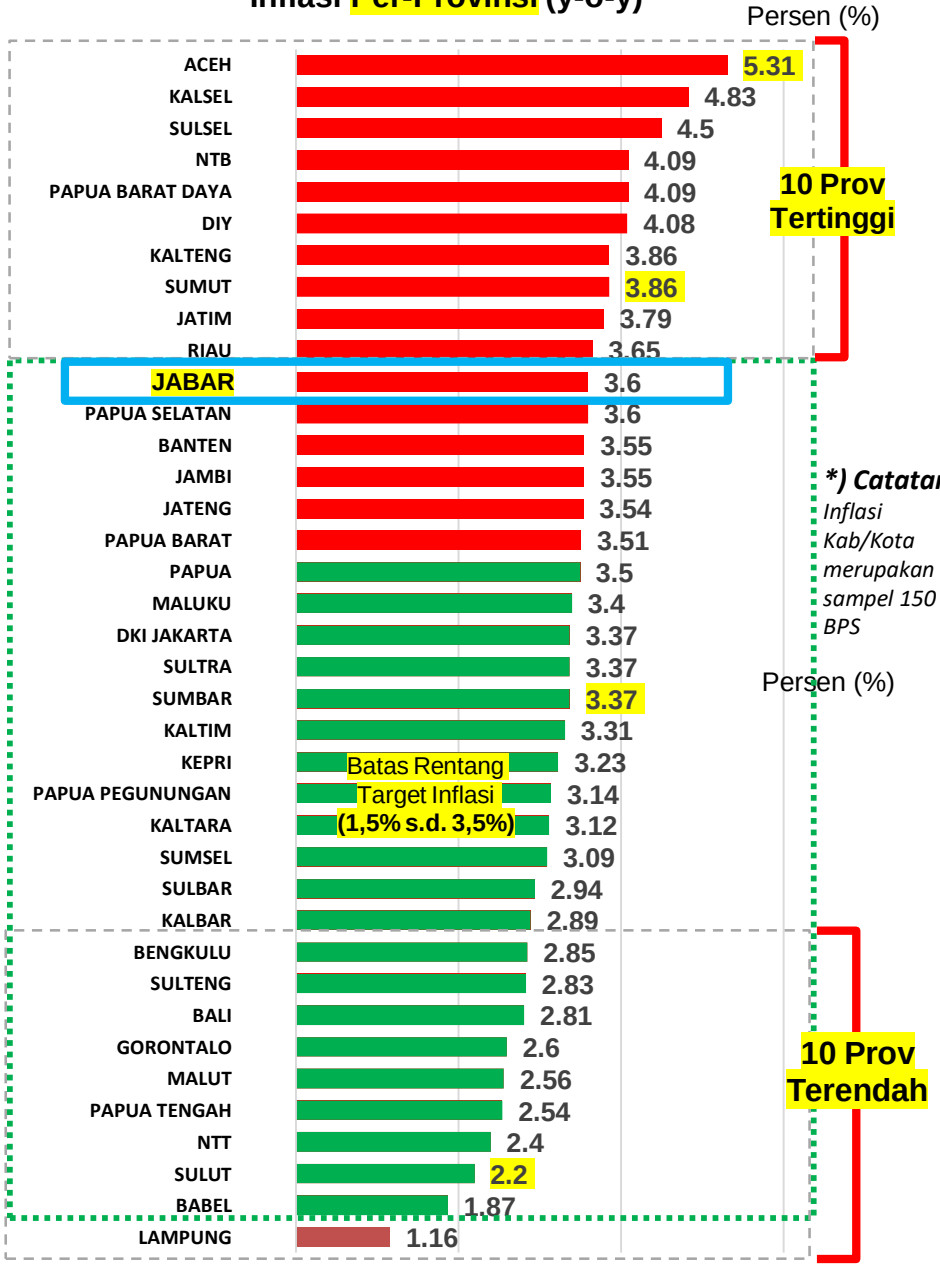


***) Catatan***
*Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 150 IHK BPS*

### Inflasi Kab (y-o-y)

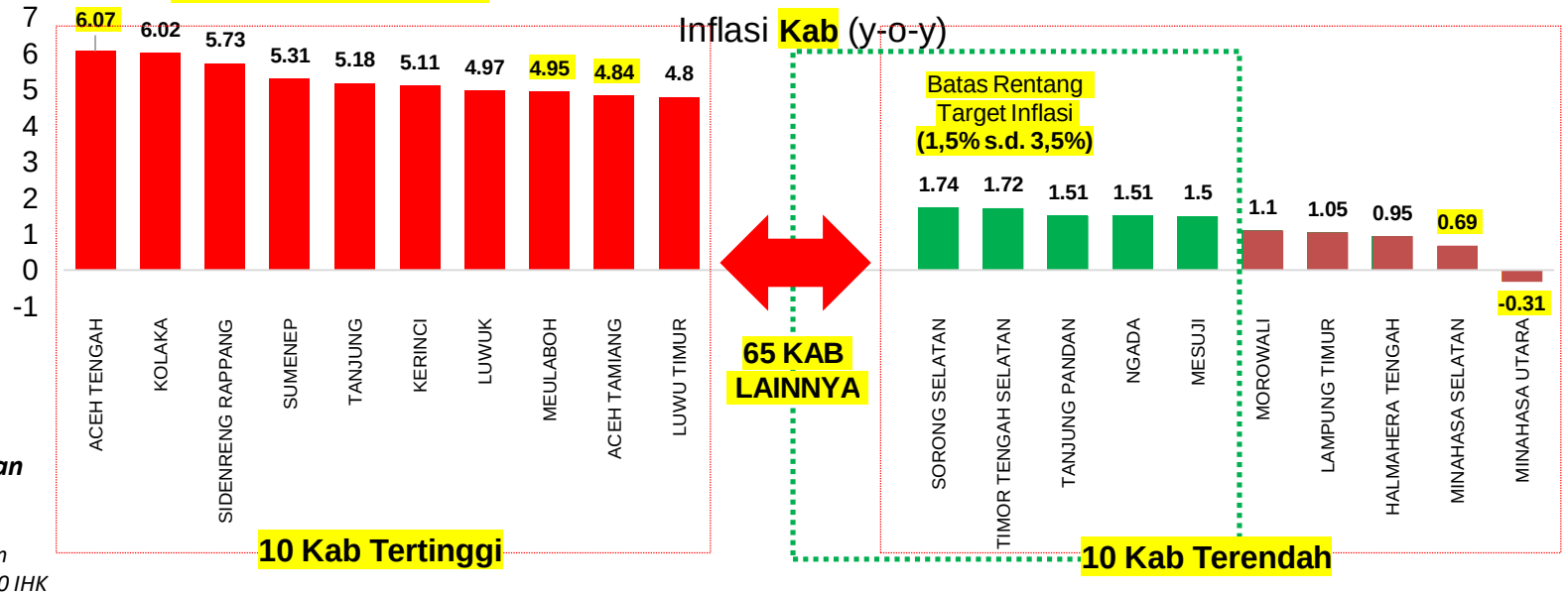


### Inflasi Kota (y-o-y)

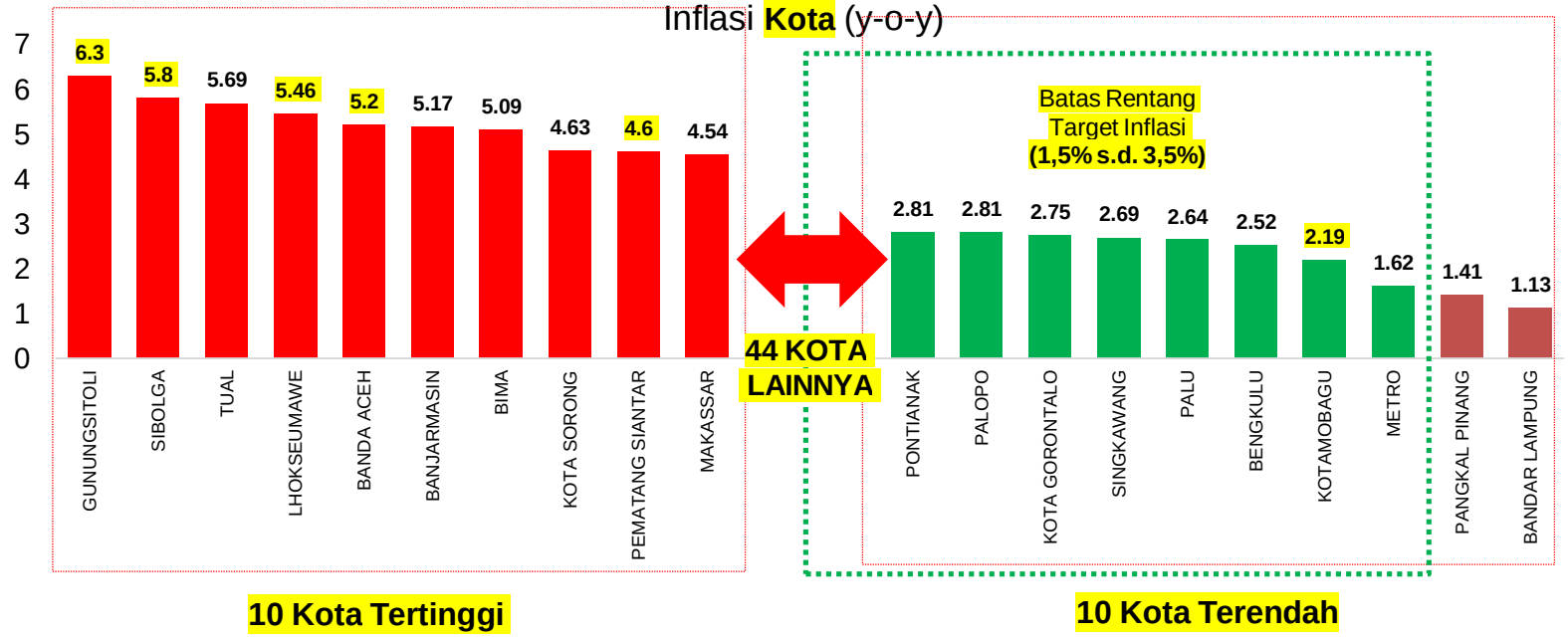


*Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik, 1 April 2026*

# CAPAIAN INFLASI PROV. JAWA BARAT

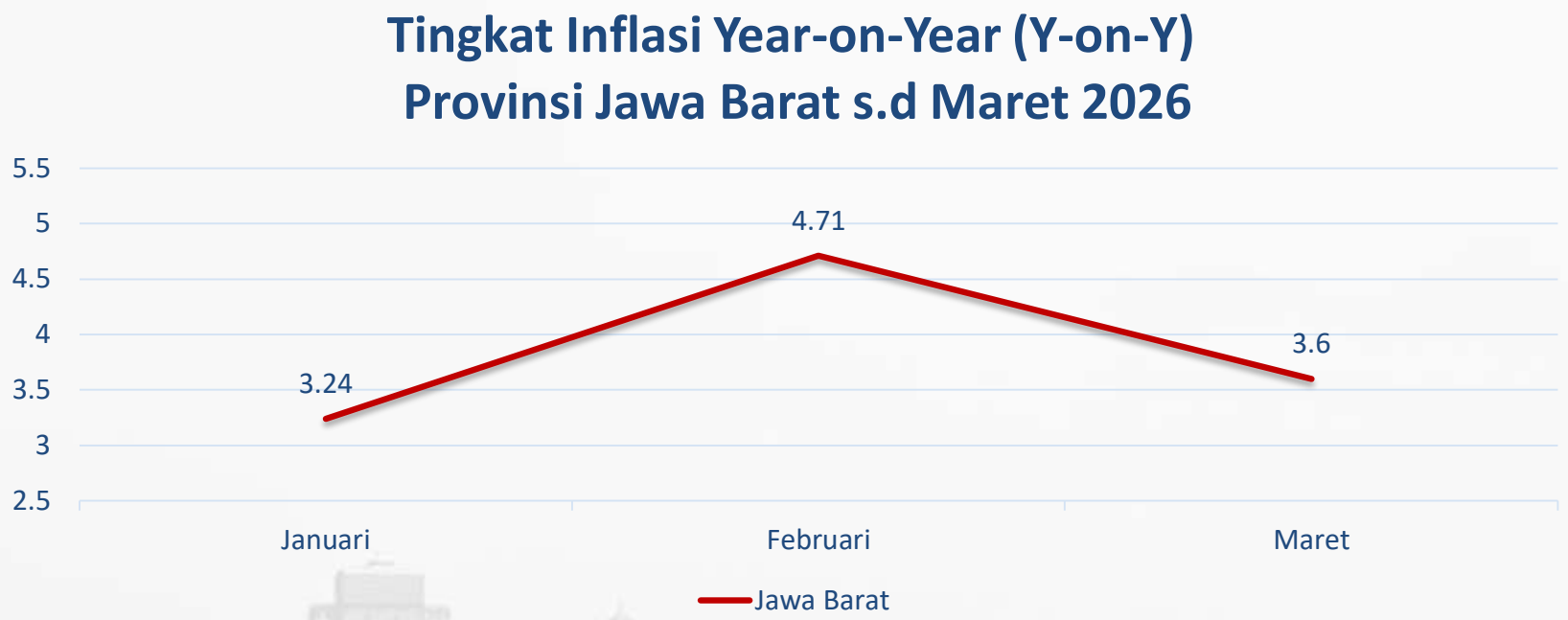

Tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) di Provinsi Jawa Barat hingga Maret 2026 menunjukkan **fluktuasi dengan tren yang relatif terkendali**. Inflasi meningkat dari **3,24% pada Januari** menjadi **4,71% pada Februari**, kemudian mengalami penurunan menjadi **3,6% pada Maret**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi tekanan inflasi pada Februari, namun pada Maret inflasi kembali mereda. Secara umum, inflasi masih berada pada tingkat yang **cukup stabil**, namun tetap perlu diperhatikan agar tidak kembali meningkat, terutama melalui pengendalian harga pangan dan menjaga kelancaran distribusi barang. Tren stabilitas mengindikasikan efektivitas intervensi pengendalian harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah, yang mampu meredam secara optimal potensi lonjakan permintaan musiman menjelang periode Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi di saat yang berdekatan.

Sumber : BPS Jabar 2026

# STUNTING DI INDONESIA

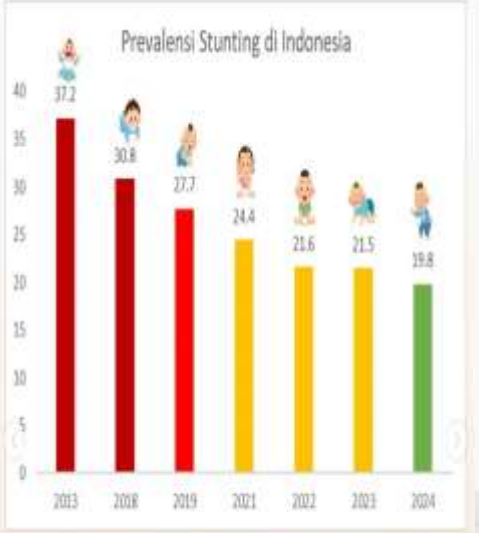


Selama kurang lebih satu dekade, Indonesia berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 17,4 % poin.

Tahun 2013 angka prevalensi stunting sebesar 37,2% dan pada tahun 2024 turun menjadi 19,8%.

Sumber : BKPK (Kemenkes)

08895 123 123 tp2stunting stunting.go.id tp2setwapres

## DATA PREVALENSI STUNTING PROVINSI TAHUN 2021 - 2024

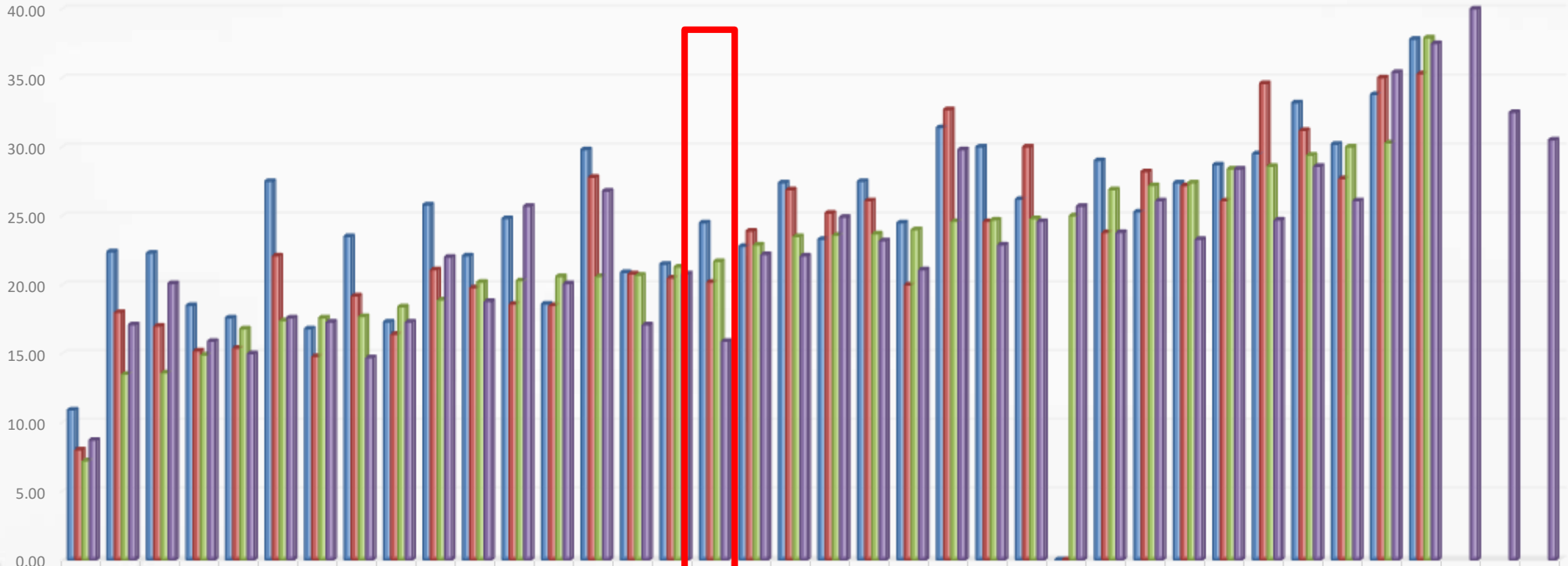


| | BALI | JAMBI | RIAU | LAMPUNG | KEPULAUAN RIAU | KALIMANTAN UTARA | DKI JAKARTA | JAWA TIMUR | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SUMATERA UTARA | BENGKULU | SUMATERA SELATAN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KALIMANTAN BARAT | JAWA TENGAH | SULAWESI UTARA | JAWA BARAT | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | SUMATERA BARAT | MALUKU UTARA | BANTEN | NUSA TENGGARA BARAT | KALIMANTAN SELATAN | PAPUA BARAT | PAPUA SELATAN | GORONTALO | SULAWESI TENGAH | SULAWESI SELATAN | MALUKU | PAPUA | ACEH | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA TENGAH | PAPUA BARAT DAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSGI2021 | 10.9 | 22.4 | 22.3 | 18.5 | 17.6 | 27.5 | 16.8 | 23.5 | 17.3 | 25.8 | 22.1 | 24.8 | 18.6 | 29.8 | 20.9 | 21.5 | 24.5 | 22.8 | 27.4 | 23.3 | 27.5 | 24.5 | 31.4 | 30.0 | 26.2 | 0.00 | 29.0 | 25.2 | 27.4 | 28.7 | 29.5 | 33.2 | 30.2 | 33.8 | 37.8 | | | |
| SSGI2022 | 8.00 | 18.0 | 17.0 | 15.2 | 15.4 | 22.1 | 14.8 | 19.2 | 16.4 | 21.1 | 19.8 | 18.6 | 18.5 | 27.8 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 23.9 | 26.9 | 25.2 | 26.1 | 20.0 | 32.7 | 24.6 | 30.0 | 0.00 | 23.8 | 28.2 | 27.2 | 26.1 | 34.6 | 31.2 | 27.7 | 35.0 | 35.3 | | | |
| SKI 2023 | 7.20 | 13.5 | 13.6 | 14.9 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 21.3 | 21.7 | 22.9 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 24.0 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 26.9 | 27.2 | 27.4 | 28.4 | 28.6 | 29.4 | 30.0 | 30.3 | 37.9 | | | |
| SSGI2024 | 8.7 | 17.1 | 20.1 | 15.9 | 15 | 17.6 | 17.3 | 14.7 | 17.3 | 22 | 18.8 | 25.7 | 20.1 | 26.8 | 17.1 | 20.8 | 15.9 | 22.2 | 22.1 | 24.9 | 23.2 | 21.1 | 29.8 | 22.9 | 24.6 | 25.7 | 23.8 | 26.1 | 23.3 | 28.4 | 24.7 | 28.6 | 26.1 | 35.4 | 37.5 | 40 | 32.5 | 30.5 |

SSGI2021 SSGI2022 SKI 2023 SSGI2024

*Sumber : Kementerian Kesehatan*

# KESEPAKATAN BERSAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI 2025-2029

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
**REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : www.kemendagri.go.id

**BERITA ACARA**
**KESEPAKATAN PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI TAHUN 2025-2029**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan rapat antara Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Tim Teknis LGSB-ASR, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian PPN/Bappenas dan BKPK Kementerian Kesehatan dalam rangka membahas dan menyepakati indikator layanan, definisi operasional, serta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan aksi konvergensi 2025-2029. Rapat ini dilakukan berdasarkan surat undangan dengan no: 400.5.6/0228/Bangda

Sesuai hasil rapat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran menggunakan aksi konvergensi kepada Pemda sesuai dengan perubahan Perpres *Stunting*.
2. Kementerian/Lembaga terkait dengan penurunan prevalensi *stunting* melakukan reviu terhadap indikator di dalam stranas dan Perpres *stunting* untuk pelaksanaan konvergensi *stunting* di daerah.
3. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 diharapkan dapat disampaikan kepada publik sebelum pelaksanaan rakortekbang yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 (17-28, Februari Tahun 2025).
4. Masing-masing K/L terkait bersama-sama membahas dan mendampingi pelaksanaan Rakortek per desk dalam pencapaian indikator konvergensi *stunting*
5. Sambil menunggu pengesahan perpres *stunting* perlu dilakukan langkah *exit strategy* oleh pemerintah pusat kepada pemda agar pemerintah daerah dapat menyusun usulan RKPD 2026 dan penyesuaian pelaksanaan APBD 2025 dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sesuai dengan indikator konvergensi *stunting* yang telah di reviu oleh K/L terkait.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 10 Januari 2025

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | H. TB. Chaerul D.S | Dir. SUPD III | |
| 2. | Diah Lenggogeni | Dir. KGM | |
| 3. | Irma Ardiana | Dir. Ketahanan Keluarga Balita dan Anak | |
| 4. | Lovely Daisy | Dir. Yankesga | |

## Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda Tanggal 17 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
**REPUBLIK INDONESIA**

17 Maret 2025

Nomor : 400.5.7/1685/Bangda
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPPS)

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi *stunting* termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi Kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi *stunting* ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan pemerintah daerah tetap melaksanakan upaya PPPS terkonvergen. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan intervensi PPPS dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari:
   a. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
   b. anak usia 0-23 bulan;
   c. anak usia 24-59 bulan;
   d. remaja putri;
   e. calon pengantin; dan
   f. keluarga dan masyarakat.
2. Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing sasaran dengan indikator layanan sebagai berikut:

| INDIKATOR LAYANAN |
|---|
| **IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI** |
| 1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK; |
| 2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; |
| 3. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil; |
| 4. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan; |
| 5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan. |
| **ANAK USIA 0 – 23 BULAN** |
| 1. Praktik Inisiasi Menyusui Dini; |
| 2. Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif; |
| 3. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam; |
| 4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI; |
| 5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk; |
| 6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan; |
| 7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; |
| 8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap; |
| 9. Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; |
| 10. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM). |

| INDIKATOR LAYANAN |
|---|
| **ANAK USIA 24 – 59 BULAN** |
| 1. Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk; |
| 2. Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan; |
| 3. Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; |
| 4. Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; |
| 5. Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia; |
| 6. Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM). |
| **REMAJA PUTRI** |
| 1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri |
| 2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri |
| **CALON PENGANTIN** |
| 1. Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan; |
| 2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*. |
| **RUMAH TANGGA MASYARAKAT** |
| 1. Akses terhadap Air Minum Aman; |
| 2. Akses terhadap Sanitasi Aman; |
| 3. Kepemilikan JKN; |
| 4. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan; |
| 5. Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); |
| 6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan. |

3. Bahwa target penurunan *stunting* dan target capaian layanan melalui indikator sebagaimana tersebut diatas untuk dipastikan masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Pemerintah daerah agar melaksanakan PPPS secara terkonvergen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi PPPS sebagaimana terlampir.
5. Pemerintah provinsi agar tetap melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi kabupaten/kota Tahun 2024 sesuai dengan juknis Penilaian Kinerja yang telah ditetapkan.
6. Untuk berkelanjutan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi PPPS dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Arifin Effendy Hutagalung Nomor Telp. 081287729875 dan Sdr. Iin Afriani Nomor Telp. 085717194385.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

Restuardy Daud

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri PPN/Bappenas;
4. Menteri Kesehatan; dan
5. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;

# KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH PROVINSI JAWA BARAT

Status Data: 10 April 2026 09:57

| Jumlah Desa/Kelurahan | Kelurahan Berbadan Hukum | Desa Berbadan Hukum | Total Berbadan Hukum |
|---|---|---|---|
| 5957 | 650 | 5321 | 5971 |

| No | Kab/Kota | Jumlah Koperasi Kelurahan Terbentuk | Jumlah Koperasi Desa Terbentuk | Jumlah Koperasi Terbentuk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. GARUT | 21 | 421 | 442 |
| 2 | KAB. BOGOR | 19 | 415 | 434 |
| 3 | KAB. CIREBON | 12 | 414 | 426 |
| 4 | KAB. SUKABUMI | 5 | 383 | 388 |
| 5 | KAB. KUNINGAN | 16 | 361 | 377 |
| 6 | KAB. CIANJUR | 6 | 355 | 361 |
| 7 | KAB. TASIKMALAYA | 2 | 351 | 353 |
| 8 | KAB. MAJALENGKA | 13 | 333 | 346 |
| 9 | KAB. INDRAMAYU | 8 | 309 | 317 |
| 10 | KAB. KARAWANG | 12 | 299 | 311 |
| 11 | KAB. BANDUNG | 10 | 270 | 280 |
| 12 | KAB. SUMEDANG | 7 | 271 | 278 |
| 13 | KAB. CIAMIS | 7 | 258 | 265 |
| 14 | KAB. SUBANG | 9 | 245 | 254 |

| No | Kab/Kota | Jumlah Koperasi Kelurahan Terbentuk | Jumlah Koperasi Desa Terbentuk | Jumlah Koperasi Terbentuk |
|---|---|---|---|---|
| 15 | KAB. PURWAKARTA | 9 | 183 | 192 |
| 16 | KAB. BEKASI | 8 | 179 | 187 |
| 17 | KAB. BANDUNG BARAT | 1 | 165 | 166 |
| 18 | KOTA BANDUNG | 151 | 0 | 151 |
| 19 | KAB. PANGANDARAN | 0 | 93 | 93 |
| 20 | KOTA TASIKMALAYA | 69 | 0 | 69 |
| 21 | KOTA BOGOR | 68 | 0 | 68 |
| 22 | KOTA DEPOK | 63 | 0 | 63 |
| 23 | KOTA BEKASI | 55 | 0 | 55 |
| 24 | KOTA SUKABUMI | 33 | 0 | 33 |
| 25 | KOTA BANJAR | 9 | 16 | 25 |
| 26 | KOTA CIREBON | 22 | 0 | 22 |
| 27 | KOTA CIMAHI | 15 | 0 | 15 |

# PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI MERAH PUTIH PROVINSI

## JAWA BARAT

**DATA STATISTIK JUMLAH KESELURUHAN GERAI KOPERASI YANG SUDAH AKTIF KOPERASI**

Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite)
**5928**

Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai)
**2430**

Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif
**3312**

Jumlah Koperasi yang Sudah Mengajukan Permohonan Kemitraan (Permohonan ke BUMN)
**967**

Jumlah Keseluruhan Pengajuan Permohonan Kemitraan (Permohonan ke BUMN)
**5133**

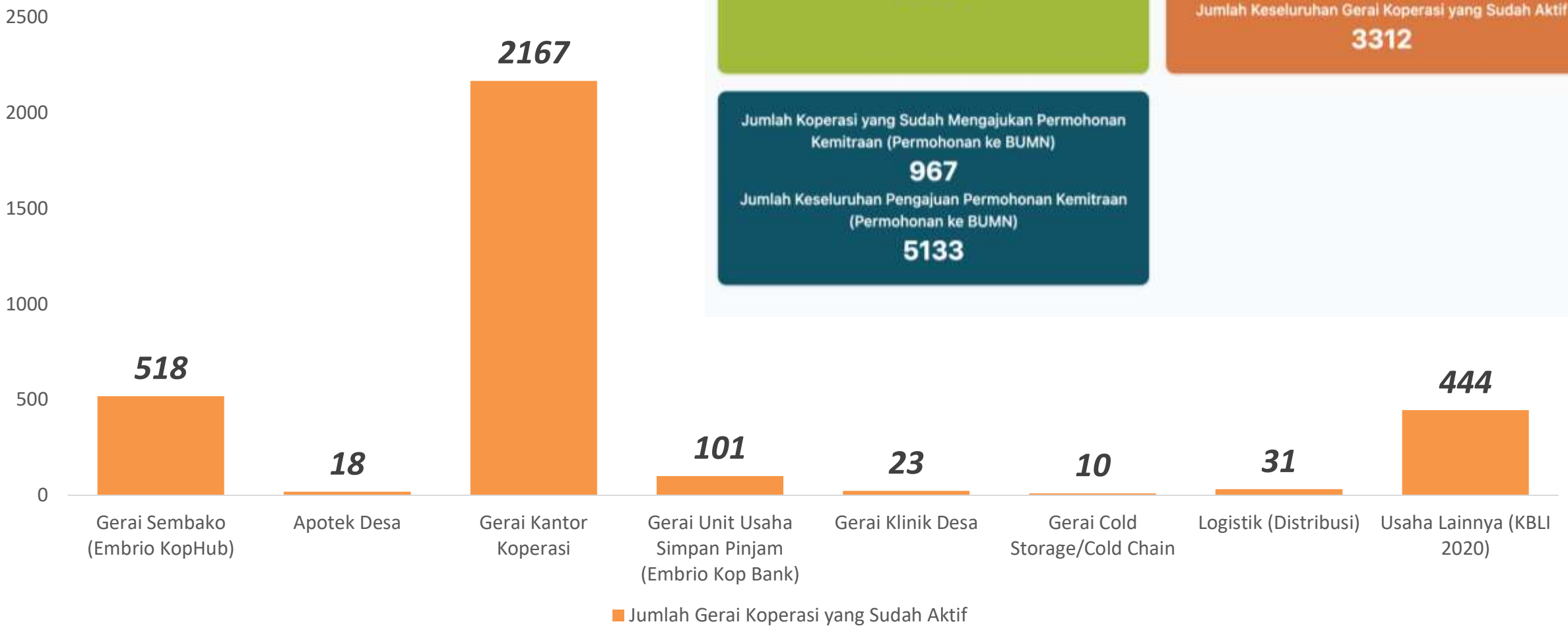


*Sumber: Dashboard Simkopdes per 10 April*

# PERKEMBANGAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DI DAERAH

## 1. SASARAN SPPG AGLOMERASI (38 PROVINSI) Data Per 2 Maret 2026

**28.562**
**Rencana SPPG**

**23.597**
**SPPG Operasional**

| No | Provinsi | Rencana SPPG | SPPG Operasional | Presentase % SPPG Operasional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 648 | 619 | 96% |
| 2 | Bali | 347 | 203 | 59% |
| 3 | Banten | 1.491 | 1.047 | 70% |
| 4 | Bengkulu | 229 | 118 | 52% |
| 5 | DIY | 392 | 395 | 101% |
| 6 | DKI Jakarta | 804 | 487 | 61% |
| 7 | Gorontalo | 114 | 78 | 68% |
| **8** | **Jabar** | **5.763** | **5.390** | **94%** |
| 9 | Jambi | 348 | 164 | 47% |
| 10 | Jateng | 3.926 | 3.740 | 95% |
| 11 | Jatim | 4.048 | 3.364 | 83% |
| 12 | Kalbar | 500 | 455 | 91% |
| 13 | Kalsel | 366 | 247 | 67% |
| 14 | Kaltara | 82 | 53 | 65% |
| 15 | Kalteng | 236 | 86 | 36% |
| 16 | Kaltim | 336 | 182 | 54% |
| 17 | Kep. Babel | 134 | 89 | 66% |
| 18 | Kepri | 234 | 206 | 88% |
| 19 | Lampung | 924 | 1.018 | 110% |
| 20 | Maluku | 193 | 98 | 51% |
| 21 | Malut | 134 | 88 | 66% |
| 22 | NTB | 689 | 716 | 104% |
| 23 | NTT | 530 | 232 | 44% |
| 24 | Pap. Pegunungan | 199 | 9 | 5% |
| 25 | Papua | 128 | 74 | 58% |
| 26 | Papua Barat | 96 | 46 | 48% |
| 27 | Papua Selatan | 86 | 13 | 15% |
| 28 | Papua Tengah | 125 | 32 | 26% |
| 29 | PBD | 117 | 33 | 28% |
| 30 | Riau | 680 | 631 | 93% |
| 31 | Sulbar | 162 | 155 | 96% |
| 32 | Sulsel | 913 | 738 | 81% |
| 33 | Sulteng | 289 | 206 | 71% |
| 34 | Sultra | 300 | 249 | 83% |
| 35 | Sulut | 222 | 159 | 72% |
| 36 | Sumbar | 549 | 361 | 66% |
| 37 | Sumsel | 824 | 700 | 85% |
| 38 | Sumut | 1.404 | 1.116 | 79% |
| **Total** | | **28.562** | **23.597** | **83%** |

## 2. SASARAN SPPG TERPENCIL (36 PROVINSI) Data Per 2 Maret 2026

**8.617**
**Target SPPG Terpencil**

**4.760**
**NOL**

**2.883**
**On Progres**

**974**
**SELESAI**

| No | Provinsi | Rencana SPPG | Selesai | On Progres | Progres Nol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera | 2.058 | 277 | 928 | 853 |
| 2 | Jawa | 261 | 62 | 71 | 128 |
| 3 | Kalimantan | 1.928 | 346 | 479 | 1.103 |
| 4 | Sulawesi | 1.012 | 168 | 417 | 427 |
| 5 | Bali & NTT | 1.267 | 64 | 491 | 712 |
| 6 | Maluku & Papua | 2.091 | 57 | 497 | 1.537 |
| **Total** | | **8.617** | **974** | **2.883** | **4.760** |

**) Kecuali DKI Jakarta & DI Yogyakarta*

*Sumber: BGN, diolah 2 Maret 2026*

# PERKEMBANGAN JUMLAH SPPG SUDAH OPERASIONAL DAN SLHS TERBIT PER PROVINSI (DATA PER 2 MARET 2026)

| No | Provinsi | SPPG Sudah Operasional | SLHS Terbit | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 619 | 73 | 11,79% |
| 2 | Bali | 203 | 47 | 23,15% |
| 3 | Banten | 1.047 | 91 | 8,69% |
| 4 | Bengkulu | 118 | 74 | 62,71% |
| 5 | DIY | 395 | 105 | 26,58% |
| 6 | DKI Jakarta | 487 | 63 | 12,94% |
| 7 | Gorontalo | 78 | 23 | 29,49% |
| **8** | **Jabar** | **5.390** | **1.496** | **27,76%** |
| 9 | Jambi | 164 | 88 | 53,66% |
| 10 | Jateng | 3.740 | 1.310 | 35,03% |
| 11 | Jatim | 3.364 | 1.214 | 36,09% |
| 12 | Kalbar | 455 | 275 | 60,44% |
| 13 | Kalsel | 247 | 27 | 10,93% |
| 14 | Kaltara | 53 | 17 | 32,08% |
| 15 | Kalteng | 86 | 27 | 31,40% |
| 16 | Kaltim | 182 | 68 | 37,36% |
| 17 | Kep. Babel | 89 | 31 | 34,83% |
| 18 | Kepri | 206 | 82 | 39,81% |
| 19 | Lampung | 1.018 | 116 | 11,39% |
| 20 | Maluku | 98 | 31 | 31,63% |
| 21 | Malut | 88 | 16 | 18,18% |
| 22 | NTB | 716 | 470 | 65,64% |
| 23 | NTT | 232 | 35 | 15,09% |
| 24 | Pap. Pegunungan | 9 | 0 | 0,00% |
| 25 | Papua | 74 | 22 | 29,73% |
| 26 | Papua Barat | 46 | 14 | 30,43% |
| 27 | Papua Selatan | 13 | 2 | 15,38% |
| 28 | Papua Tengah | 32 | 21 | 65,63% |
| 29 | PBD | 33 | 17 | 51,52% |
| 30 | Riau | 631 | 184 | 29,16% |
| 31 | Sulbar | 155 | 16 | 10,32% |
| 32 | Sulsel | 738 | 334 | 45,26% |
| 33 | Sulteng | 206 | 67 | 32,52% |
| 34 | Sultra | 249 | 37 | 14,86% |
| 35 | Sulut | 159 | 37 | 23,27% |
| 36 | Sumbar | 361 | 58 | 16,07% |
| 37 | Sumsel | 700 | 412 | 58,86% |
| 38 | Sumut | 1.116 | 204 | 18,28% |
| **Total** | | **23.597** | **7.204** | **30,53%** |

**Total Provinsi**

**38**

**Total SPPG Sudah Operasional**

**23.597**

**Jumlah SLHS Terbit**

**7.204**

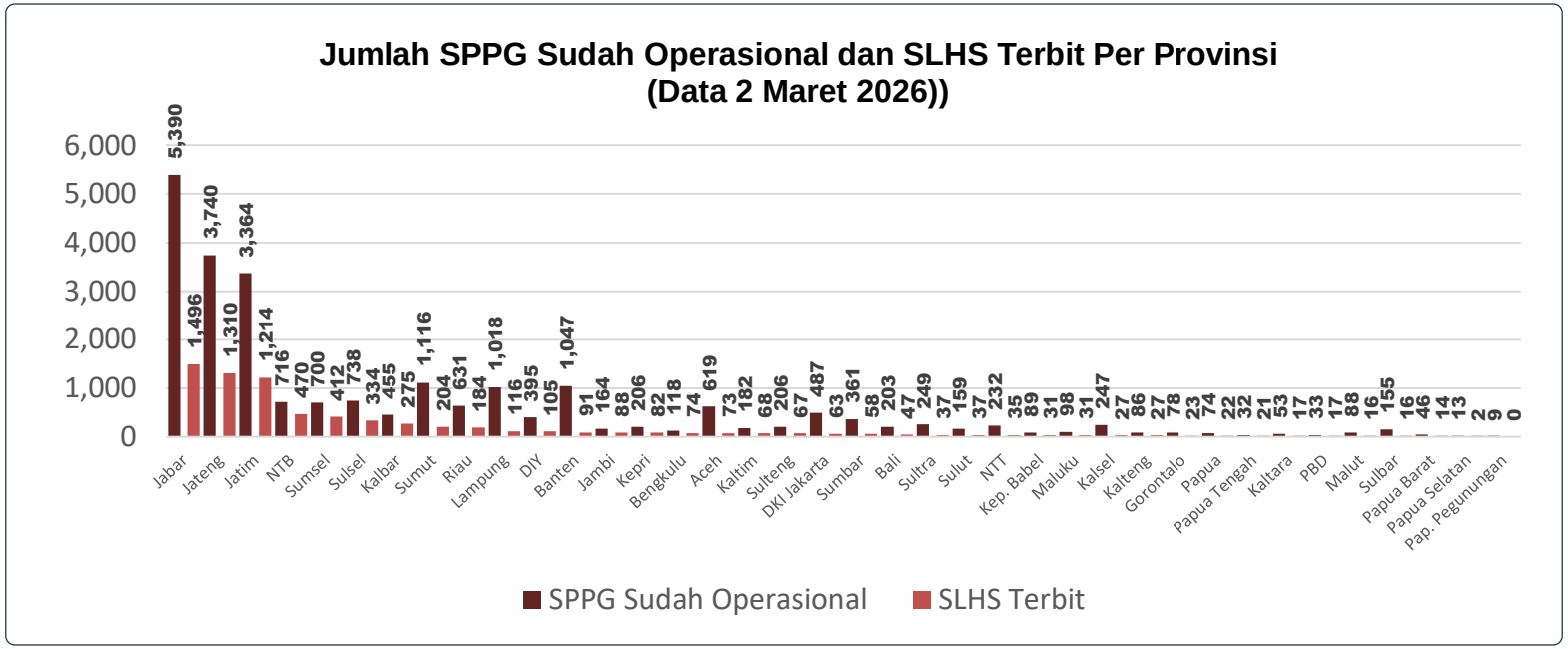


**Pemerintah Daerah agar melakukan Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar SPPG dapat beroperasional**

*Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah 2 Maret 2026*

# STATISTIK SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) PROV. JAWA BARAT

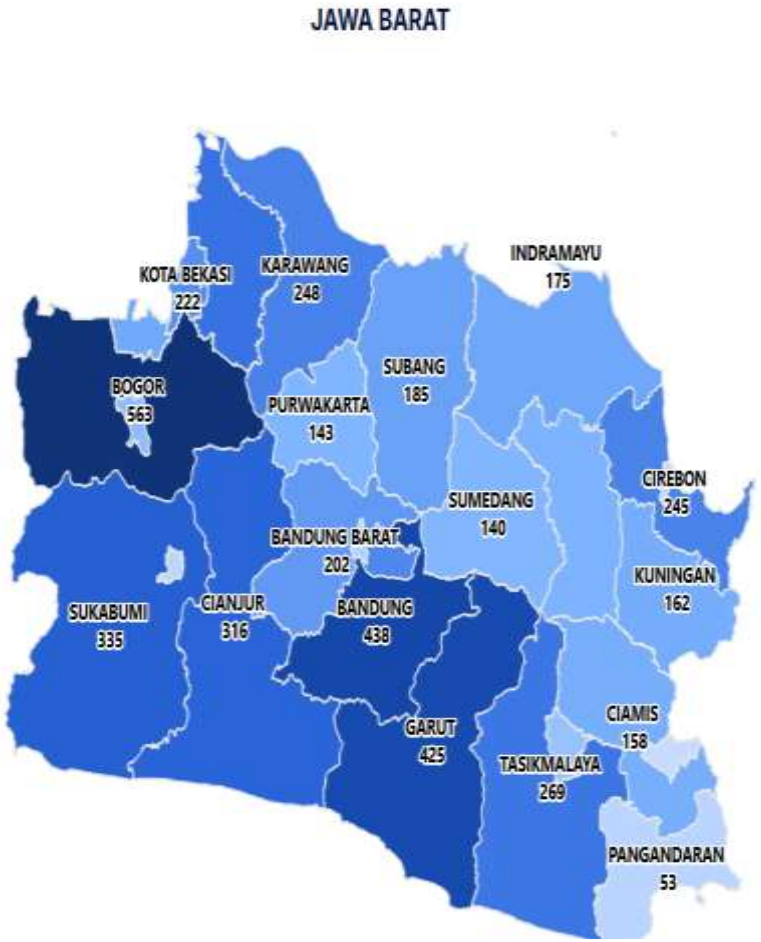


## Statistik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Data berdasarkan BA Verval terkini

**Total SPPG** — BA Verval terdata
SPPG
TOTAL 24,443
Persiapan 1,472 | Operasi 22,971
Lihat detail

**Sertifikasi** — Sertifikasi dimiliki SPPG
SERTIFIKASI
TOTAL 19,696
Lihat detail

**Mitra** — Mitra pendukung MBG
MITRA
TOTAL 24,159
Lihat detail

**Supplier** — Supplier MBG SPPG
SUPPLIER
TOTAL 94,056
Lihat detail

### Sertifikasi SPPG
Jenis sertifikasi dimiliki — 19,696

RINCIAN

| | | |
|---|---|---|
| Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SL... | 8,700 | 44% |
| Sertifikasi Chef | 6,523 | 33% |
| Sertifikasi Halal | 2,261 | 11% |
| Hazard Analysis and Critical Control Poi... | 781 | 4% |
| Sistem Manajemen Keamanan Pangan ... | 1,081 | 5% |
| Sistem Manajemen Kesehatan dan Kese... | 350 | 2% |

### Mitra BGN
Mitra pendukung program MBG — 24,159

RINCIAN

| | | |
|---|---|---|
| UMKM | 973 | 4% |
| Koperasi | 365 | 2% |
| Bumdes | 45 | 0% |
| Bumdesma | 12 | 0% |
| CV | 1,083 | 4% |
| PT | 651 | 3% |
| Yayasan | 21,022 | 87% |
| BUMD Kab/Kota | 8 | 0% |

### Supplier MBG
Supplier dilibatkan dalam MBG — 94,056

RINCIAN

| | | |
|---|---|---|
| Koperasi | 9,861 | 10% |
| Bumdes | 1,027 | 1% |
| Bumdesma | 117 | 0% |
| UMKM | 38,938 | 41% |
| Supplier Lain | 43,723 | 46% |
| Koperasi Desa Merah Putih | 390 | 0% |

# DAFTAR PEMDA YANG TELAH MENGIRIMKAN LAPORAN USULAN DAN KESIAPAN PEMBANGUNAN (PROPOSAL) SEKOLAH RAKYAT (SR) UNTUK DIVERIFIKASI

**Total Sudah**

**322**

**Daerah Prov & Kab/Kota**

**Total Belum**

**230**

**Daerah Prov & Kab/Kota**

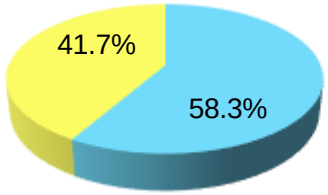


Keterangan:

- **Total Jumlah Prov & Kab/Kota: 552 Daerah**
- Proposal usulan ditujukan ke Kemensos dan Kemendagri

**Provinsi Sudah** Mengirimkan Laporan Usulan & Kesiapan Pembangunan SR : **24 Provinsi**

**Provinsi Belum** Mengirimkan Laporan Usulan & Kesiapan Pembangunan SR : **14 Provinsi**

Keterangan:
**Total Jumlah Provinsi 38**

**Kab/Kota Sudah** Mengirimkan Laporan Usulan & Kesiapan Pembangunan SR : **298 Kab/Kota**

**Kab/Kota Belum** Mengirimkan Laporan Usulan & Kesiapan Pembangunan SR : **216 Kab/Kota**

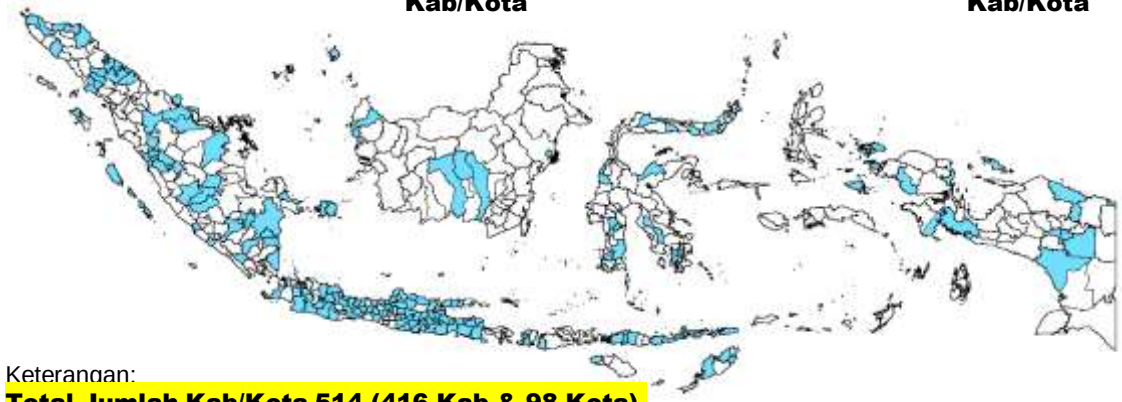

Keterangan:
**Total Jumlah Kab/Kota 514 (416 Kab & 98 Kota)**

| No. | Prov | Status Usulan Prov | Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota Sudah | Kab/Kota Belum |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Prov. Aceh | Sudah | 23 | 17 | 6 |
| 2 | Prov. Bali | Sudah | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Prov. Banten | Sudah | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Prov. Bengkulu | Sudah | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Prov. DIY | Sudah | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Prov. DKI Jakarta | Belum | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Prov. Gorontalo | Sudah | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Prov. Jabar | Sudah | 27 | 24 | 3 |
| 9 | Prov. Jambi | Belum | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Prov. Jateng | Sudah | 35 | 32 | 3 |
| 11 | Prov. Jatim | Sudah | 38 | 36 | 2 |
| 12 | Prov. Kalbar | Sudah | 14 | 5 | 9 |
| 13 | Prov. Kalsel | Sudah | 13 | 2 | 11 |
| 14 | Prov. Kaltara | Sudah | 5 | 2 | 3 |
| 15 | Prov. Kalteng | Belum | 14 | 5 | 9 |
| 16 | Prov. Kaltim | Sudah | 10 | 5 | 5 |
| 17 | Prov. Kep. Babel | Belum | 7 | 3 | 4 |
| 18 | Prov. Kepri | Sudah | 7 | 3 | 4 |
| 19 | Prov. Lampung | Sudah | 15 | 13 | 2 |
| 20 | Prov. Maluku | Sudah | 11 | 6 | 5 |
| 21 | Prov. Malut | Sudah | 10 | 2 | 8 |
| 22 | Prov. NTB | Sudah | 10 | 4 | 6 |
| 23 | Prov. NTT | Sudah | 22 | 19 | 3 |
| 24 | Prov. Papua | Belum | 9 | 6 | 3 |
| 25 | Prov. Papua Barat | Belum | 7 | 3 | 4 |
| 26 | Prov. Papua Barat Daya | Belum | 6 | 3 | 3 |
| 27 | Prov. Papua Pegunungan | Belum | 8 | 4 | 4 |
| 28 | Prov. Papua Selatan | Belum | 4 | 1 | 3 |
| 29 | Prov. Papua Tengah | Belum | 8 | 1 | 7 |
| 30 | Prov. Riau | Sudah | 12 | 9 | 3 |
| 31 | Prov. Sulbar | Sudah | 6 | 5 | 1 |
| 32 | Prov. Sulsel | Belum | 24 | 10 | 14 |
| 33 | Prov. Sulteng | Sudah | 13 | 3 | 10 |
| 34 | Prov. Sultra | Sudah | 17 | 9 | 8 |
| **35** | Prov. Sulut | Belum | 15 | 2 | 13 |
| 36 | Prov. Sumbar | Belum | 19 | 8 | 11 |
| 37 | Prov. Sumsel | Belum | 17 | 9 | 8 |
| 38 | Prov. Sumut | Sudah | 33 | 21 | 12 |
| **Total** | | | **514** | **298** | **216** |

*Sumber: Data Kemendagri dan Pemda, diolah 30 Januari 2026*

# KEMENDAGRI MENGOORDINASIKAN TERKAIT PENGGUNAAN ASET PEMDA UNTUK SEKOLAH RAKYAT



## ARAHAN PRESIDEN

**Target pembangunan sekolah rakyat**

**200**

**Titik Lokasi Sekolah Rakyat Tahun 2025**

**100**

Sekolah Rakyat dibangun oleh **APBN**

Didukung oleh KemenPU

**100**

Sekolah Rakyat dibangun oleh dukungan Swasta, Didukung oleh Mensesneg dan KemenBUMN

## PENTAHAPAN KEMENSOS

**TAHAP 1** **166** Lokasi Sekolah Rakyat

### TAHAP 1a
**Sudah Beroperasi**

**63** Titik Lokasi

44 Aset kemensos
16 Aset Pemda
3 Aset Universitas

*Operasional 14 Juli 2025

**251 Rombel**
- 3 Rombel SD
- 112 Rombel SMP
- 136 Rombel SMA

**6.180 Siswa**
- 75 Siswa SD
- 2.800 Siswa SMP
- 3.305 Siswa SMA

### TAHAP 1b
**Sudah Beroperasi**

**37** Titik Lokasi

Aset Pemda

*Operasional Agustus 2025

**142 Rombel**
- 4 Rombel SD
- 53 Rombel SMP
- 85 Rombel SMA

**3.525 Siswa**
- 100 Siswa SD
- 1.310 Siswa SMP
- 2.115 Siswa SMA

**Rombel : Rombongan Belajar**
**Tendik : Tenaga Kependidikan**

**Tahap 1a dan 1b mencakup 9.705 Siswa, 1.469 Guru dan 2.730 Tenaga Pendidik**

### TAHAP 1c

**66** Titik Lokasi

16 Aset Pusat
50 Aset Pemda

*Pemutakhiran pada 10 Oktober 2025

**248 Rombel**
- 122 Rombel SD
- 73 Rombel SMP
- 53 Rombel SMA

**6.190 Siswa**
- 3.050 Siswa SD
- 1.820 Siswa SMP
- 1.320 Siswa SMA

**Tahap 1c mencakup 6.190 Siswa, 855 Guru dan 1.712 Tenaga Pendidik**

**Sebaran Lokasi Sekolah Rakyat (SR) (Aset Pusat dan Daerah) di Kab/Kota (1A, 1B, 1C)**

**Keterangan:**
- 1A
- 1A1C
- 1APUSAT
- 1B
- 1B1C
- 1C
- 1CPUSAT
- TIDAK ADA SR

*Sumber: Kemensos, diolah 30 Januari 2026*

# SEBARAN 18 TITIK LOKASI SEKOLAH GARUDA BARU DAN TRANSFORMASI

## Lokasi Sekolah Unggul Garuda Baru

SMA Unggul Garuda Baru merupakan sekolah yang dibangun dari nol. Terdapat 4 provinsi yang akan dibangun Sekolah Unggul Garuda Baru sekolah, di antaranya:

Sekolah Unggul Garuda Transformasi akan mendapatkan **pengayaan dari 6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia hingga akhir tahun 2025**.
Perguruan tinggi pelaksana pengayaan terbagi menjadi berikut:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitas Negeri Jakarta | Universitas Indonesia | Universitas Pendidikan Nasional | Universitas Padjajaran | Institut Teknologi Bandung | IPB University |
| SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh | MAN Insan Cendekia OKI Sumsel | SMA Cahaya Rancamaya Bogor | SMA Pradita Dirgantara Surakarta | SMA Taruna Nusantara Magelang | MAN Insan Cendekia Gorontalo |
| SMAS Unggul Del Toba Sumut | SMAN Unggulan MH. Thamrin Jakarta | SMAN Banua Kalsel | SMAN 10 Samarinda Kaltim | SMAN Siwalima Ambon | SMA Averos Sorong Papua Barat Daya |

*Sumber: Kemendiktisaintek, diolah 27 Okt 2025*

# ARAHAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

# KEBIJAKAN YANG AKAN DITERBITKAN OLEH KEMENDAGRI

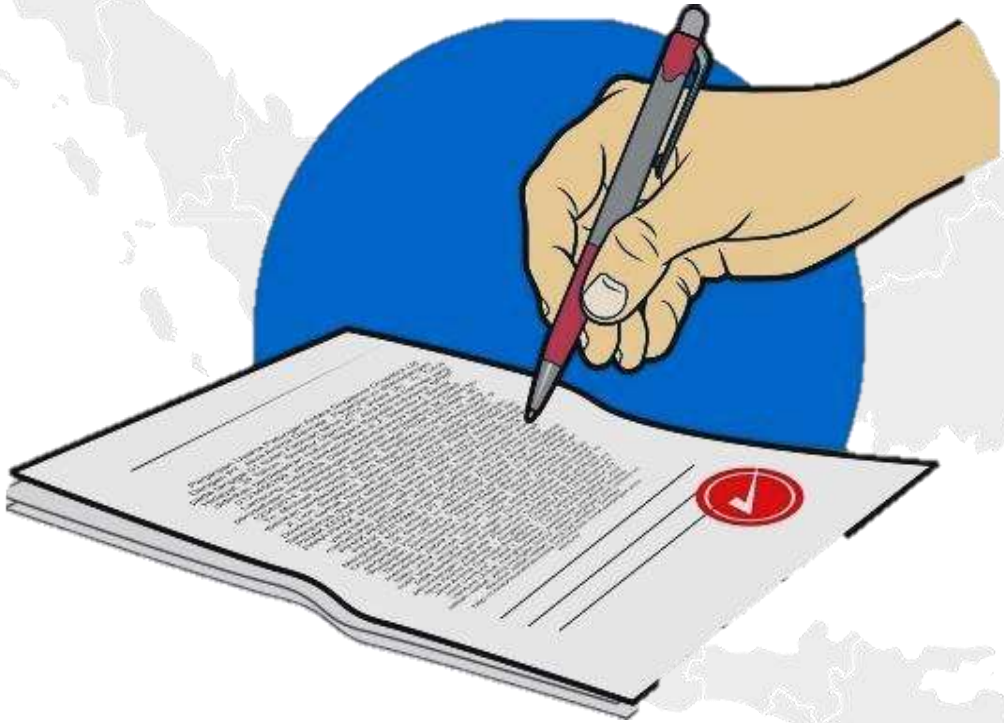

1. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027
2. Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027
3. Pedoman Ren-Binwas Peny. Pemda Tahun 2027
4. Pedoman Manajemen Resiko Pembanguan Daerah
5. Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
6. Pedoman Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah
7. Pedoman Pelaksanaan LEPPD (IKK)

# TIMELINE PENYUSUNAN RKPD DALAM RANCANGAN PERMENDAGRI

| KEGIATAN | | 2025 | 2026 | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEC | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | |
| PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD | Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD | | | | | | | | | Dec-2025 |
| | Orientasi RKPD | | | | | | | | | |
| | penyusunan agenda kerja | | | | | | | | | |
| | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD | | | | | | | | | |
| PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD | Musrenbang desa/kelurahan | | | | | | | | | |
| | Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | M2 Feb 2026 |
| | Konsultasi Publik | | | | | | | | | |
| | Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | M1 Maret 2026 |
| PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD | Penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan verifikasi Renja PD | | | | | | | | | Prov: M2 Maret 2026; Kab/Kota: M4 Maret 2026 |
| | Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi Kepada Bupati/Walikota | | | | | | | | | M4 Maret 2026 |
| PELAKSANAAN MUSRENBANG | Penyampaian Pokir DPRD | | | | | | | | | Paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang |
| | Persiapan Musrenbang | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Rakortekbang Provinsi | | | | | | | | | M1 Mei 2026 Paling Lambat Bersamaan dengan Musrenbang RKPD Provinsi) |
| | Pelaksanaan Musrenbang RKPD | | | | | | | | | Kab/kota: Paling lambat M3 April 2026; Prov: Paling lambat M1 Mei 2026 |

# TIMELINE PENYUSUNAN RKPD DALAM RANCANGAN PERMENDAGRI

| KEGIATAN | | 2025 | 2026 | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEC | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | |
| PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD | Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan BA kesepakatan Musrenbang | | | | | | | | | |
| | Penyelesaian Rankir RKPD | | | | | | | | | M4 Mei 2026 |
| | Penyusunan Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | 15 hari sejak dokumen lengkap |
| PENETAPAN RKPD | Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD berdasarkan hasil fasilitasi | | | | | | | | | |
| | Penetapan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | Prov: Paling lambat M4 Juni 2026; Kab/Kota: paling lambat 7 hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau paling lambat minggu pertama Bulan Juli Tahun 2026 |

# POIN-POIN MUATAN PEDOMAN RKPD TAHUN 2027

01 Format-format:
1. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD/P-RKPD
2. Pengendalian dan Evaluasi

02 Jadwal penyusunan dan penetapan RKPD

03 Arahan substansi bab per bab RKPD sebagai operasionalisasi RPJMD

04 Penginputan dan proses RKPD dalam SIPD (DSSD, dan Subkeg. Layanan)

05 Penyusunan RKPD berdasarkan pengendalian dan evaluasi hasil RKPD

06 Arahan perubahan RKPD Tahun 2027 (berdasarkan Dalev sampai dengan Triwulan II)

07 Persyaratan fasilitasi (Dalev untuk penyusunan RKPD dan P-RKPD Tahun 2027)

08 Arahan substansi Renja PD

09 Hal-hal yang perlu menjadi perhatian daerah:
1. Kebijakan umum pelaksanaan pemerintah daerah sesuai regulasi mandatori
2. Kebijakan tematik pembangunan (ProSN/Lainnya)
3. Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
4. Kebijakan Direktif Pemerintah

# PENGENDALIAN DAN EVALUASI MELALUI PENGENDALIAN EVALUASI RKPD DALAM SIPD

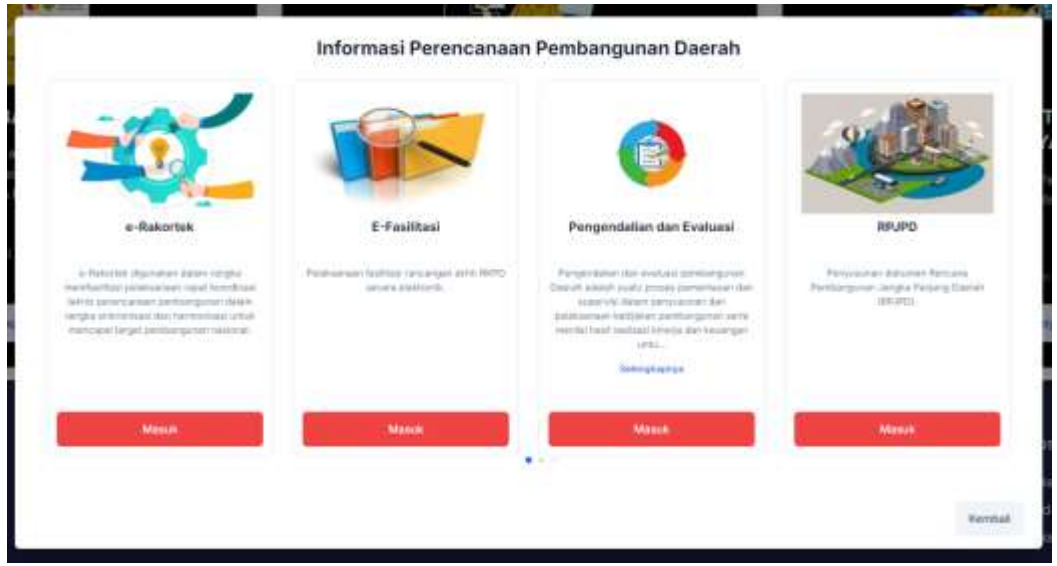

Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap triwulan melalui evaluasi capaian keuangan dan kinerja, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung keberhasilan serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam mencapai target kinerja.

# PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROSN DALAM SIPD



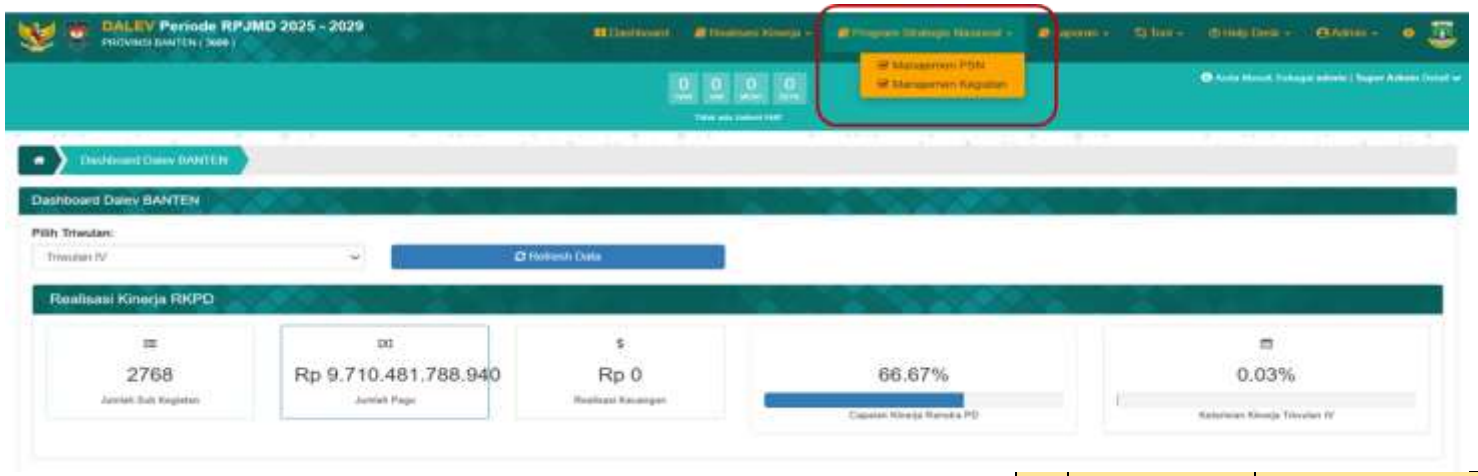


Daftar Program Strategis Nasional (ProSN) dimungkinkan untuk dilakukan penambahan dan/atau pemutakhiran sebagaimana diatur dalam Pedum RKPD Tahun 2026:

*Pasal 14*

Dalam hal RKP Tahun 2026 dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2026 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 atau Perbup/Perwali tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

| No | ProSN | Proyek/Kegiatan | Dasar Pelaksanaan (Penugasan) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | 1. Penanggulangan Kemiskinan | Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem |
| | | 2. Penghapusan Kemiskinan Eksetrim | |
| | | 3. Sekolah Rakyat | |
| | | 4. Pembangunan 3 Juta Rumah | Perpres 12/2025 tentang RPJMN |
| 2. | Ketahanan Pangan | 1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) | Inpres 2 / 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan |
| | | 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian | Inpres 3 / 2025 yentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan |
| | | 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah | Inpres 6 / 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah |
| | | 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate) | Perpres 12/2025 tentang RPJMN |
| 3. | Kesehatan untuk Semua | 1. Stunting | Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Draft Ranperpres RIBK) |
| | | 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Perpres 12/2025 tentang RPJMN (Draft Ranperpres RIBK) |
| | | 3. Jaminan Kesehatan Nasional | Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Draft Ranperpres RIBK) |
| | | 4. Penuntasan TBC | Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Draft Ranperpres RIBK) |
| | | 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota | Perpres 12/2025 tentang RPJMN (Draft Ranperpres RIBK) |
| 4. | Perluasan Akses Pendidikan | 1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD | Inpres 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran |
| | | 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| | | 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran | |
| | | 4. Makan Bergizi Gratis | Perpres 83 /2024 tentang BGN, Perpres 12/2025 tentang RPJMN |
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi | 1. Pengendalian Inflasi | Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional |
| | | 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Inpres 9/2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih |
| | | 3. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah | Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 |
| | | 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) | Perpres 12/2025 tentang RPJMN |
| | | 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |

# DUKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DALAM RAKORTEKRENBANG TAHUN 2026

Pada **Rakortekrenbang 2026**, komitmen dukungan Provinsi Jawa Barat terhadap pencapaian **outcome prioritas** nasional tercatat pada pagu anggaran sebesar **Rp 1,2 Triliun**. Postur alokasi pendanaan ini menunjukkan fokus pembangunan daerah yang sangat tajam pada sektor **infrastruktur fisik, di mana lebih dari 40% total pagu (44,3%)** didominasi oleh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Strategi penganggaran ini, yang kemudian diikuti oleh prioritas pada urusan ESDM (14,3%) dan layanan dasar seperti **Kesehatan (10,4%)** serta **Kesatuan Bangsa dan Politik (9,2%),** menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam mempercepat penyediaan infrastruktur konektivitas sekaligus menjamin kelayakan infrastruktur dasar masyarakat.

Grafik Pagu Pendukung Outcome Prioritas JAWA BARAT

Jumlah dan Persentase pagu JAWA BARAT mendukung Outcome Prioritas per-urusan

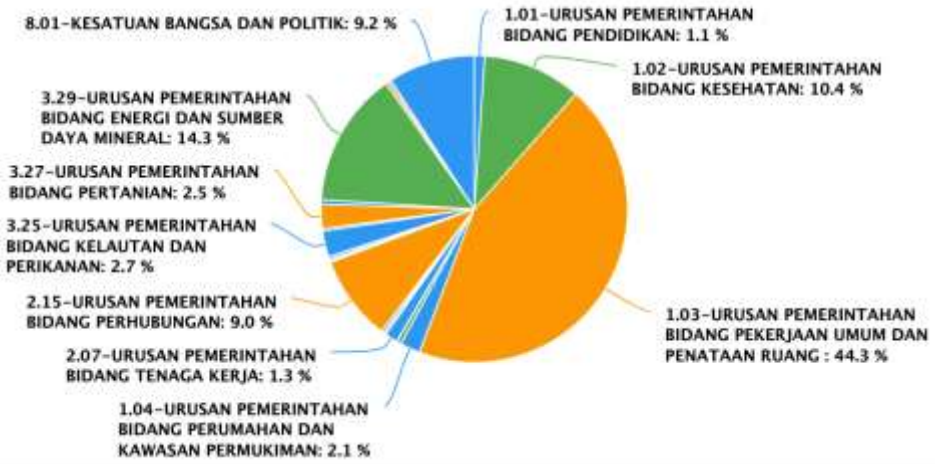


**GRAFIK KETERISIAN PAGU SUBKEGIATAN MENDUKUNG OUTCOME PRIORITAS**

*Keterangan : Persentase dihitung berdasarkan jumlah pagu mendukung indikator Outcome Prioritas per-urusan dibagi jumlah pagu mendukung indikator Outcome Prioritas daerah.*

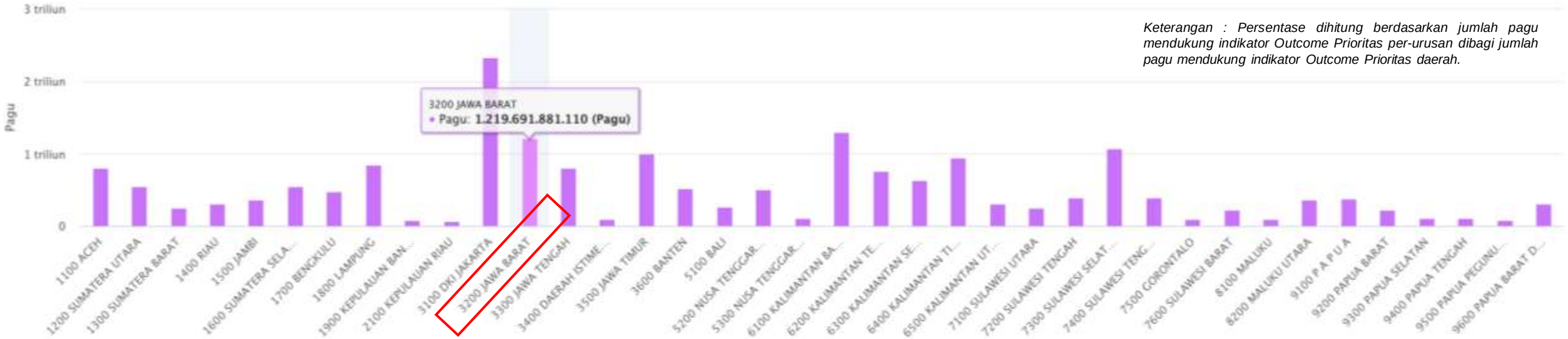

# ARAHAN DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN RKPD 2027

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memberikan penekanan pada muatan substansi dan penguatan bab per bab RKPD, sehingga RKPD menjadi dokumen operasionalisasi dari RPJMD yang telah selaras dengan RPJMN dan RKP.

Memastikan pengawalan pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dan Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Memastikan arah kebijakan umum pembangunan nasional atau hal-hal perlu lainnya yang menjadi bagian substansi RKP Tahun 2027 dan akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Fokus dalam pengendalian dan evaluasi capaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RKPD tahun 2027 dan perencanaan subkegiatan/output bersifat layanan.

Keselarasan kebijakan dan muatan dalam pedoman penyusunan RKPD, penyusunan APBD, dan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

# SURAT EDARAN DAN PANDUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELOMPOK RENTAN DALAM MUSRENBANG RKPD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

27 Januari 2026

Nomor : 000.8.2.6/0829/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musrenbang Tematik

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengenai bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mendorong pelibatan masyarakat termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dapat diwujudkan apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas mereka. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD merupakan instrumen strategis yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penentuan arah pembangunan tahunan daerah.
2. Untuk itu, telah disusun dokumen Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik yang memuat prinsip-prinsip partisipasi inklusif, tahapan perencanaan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan, serta metode praktis bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan kelompok rentan secara adil, setara, dan efektif dalam penyusunan RKPD.
3. Panduan teknis dimaksud menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai:
   a. Rujukan teknis bagi pemerintah daerah, fasilitator, maupun pendamping masyarakat untuk merancang dan melaksanakan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik yang inklusif;
   b. Pedoman pelatihan bagi organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi perempuan, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), akademisi, dan organisasi pendamping untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal proses perencanaan pembangunan daerah; dan
   c. Instrumen pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana proses Musrenbang telah memenuhi standar partisipasi yang inklusif, transparan, dan responsif.

Akses panduan: **bit.ly/SEdanPanduanParmas**

- **Musrenbang RKPD diharapkan diselenggarakan secara inklusif, dengan memastikan keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan** (perempuan, anak, lansia, disabilitas, Masyarakat adat dll.).
- Oleh karena itu, Kemendagri telah menyusun **Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik** yang menjelaskan urgensi dan mekanisme partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD.
- **Pemerintah daerah diminta mengimplementasikan panduan teknis yang telah disusun** sebagai acuan, melaksanakan proses secara partisipatif, serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan tepat sasaran.

# ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

# DASAR HUKUM PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PRO-SN)

## Pasal 67 huruf f UU 23/2014

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

f. melaksanakan program strategis nasional

## Pasal 68 Ayat (1) UU 23/2014

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengalankan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional sesuai dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan program strategi nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6984);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 ttg Pembinaan dan Pengawasan Kinerja KDH dan Wakil KDH dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 100.2.4/3207/SJ
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025-2029
PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka menjalankan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memastikan pembangunan daerah telah selaras dengan sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu adanya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung keberhasilan pencapaian target Program Strategis Nasional pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk:
1. Memastikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menjadikan Program Strategis Nasional sebagai program kerja/kegiatan pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengidentifikasi capaian dan hambatan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional; dan
3. Memberikan saran perbaikan yang harus dilakukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan capaian dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional.

SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SK dan Nomor 3 Tahun 2025 ttg Pembinaan dan Pengawasan Kinerja KDH dan Wakil KDH dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

# Program Strategis Nasional (ProSN) –RAPERMENDAGRI PEDUM RKPD TAHUN 2027

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan Subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

| NO | Pro-SN | PROYEK/KEGIATAN |
|---|---|---|
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem |
| 2 | | 2) Sekolah Rakyat |
| 3 | | 3) Pembangunan 3 Juta Rumah |
| 4 | Ketahanan Pangan | 1) Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) |
| 5 | | 2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian |
| 6 | | 3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah |
| 7 | | 4) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate) |
| 8 | | 5) Pangan Akuatik |
| 9 | | 6) Kampung Nelayan Merah Putih |
| 10 | Kesehatan untuk Semua | 1) Stunting |
| 11 | | 2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis |
| 12 | | 3) Jaminan Kesehatan Nasional |
| 13 | | 4) Penuntasan TBC |
| 14 | | 5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota |
| 15 | | 6) Makan Bergizi Gratis |
| 16 | Perluasan Akses Pendidikan | 1) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah |
| 17 | Pertumbuhan Ekonomi | 1) Pengendalian Inflasi |
| 18 | | 2) Optimalisasi APBD |
| 19 | | 3) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
| 20 | | 4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) |
| 21 | | 5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah |

# MOMEN STRATEGIS PENGAWALAN PROSN

## MOMEN STRATEGIS SINKRONISASI

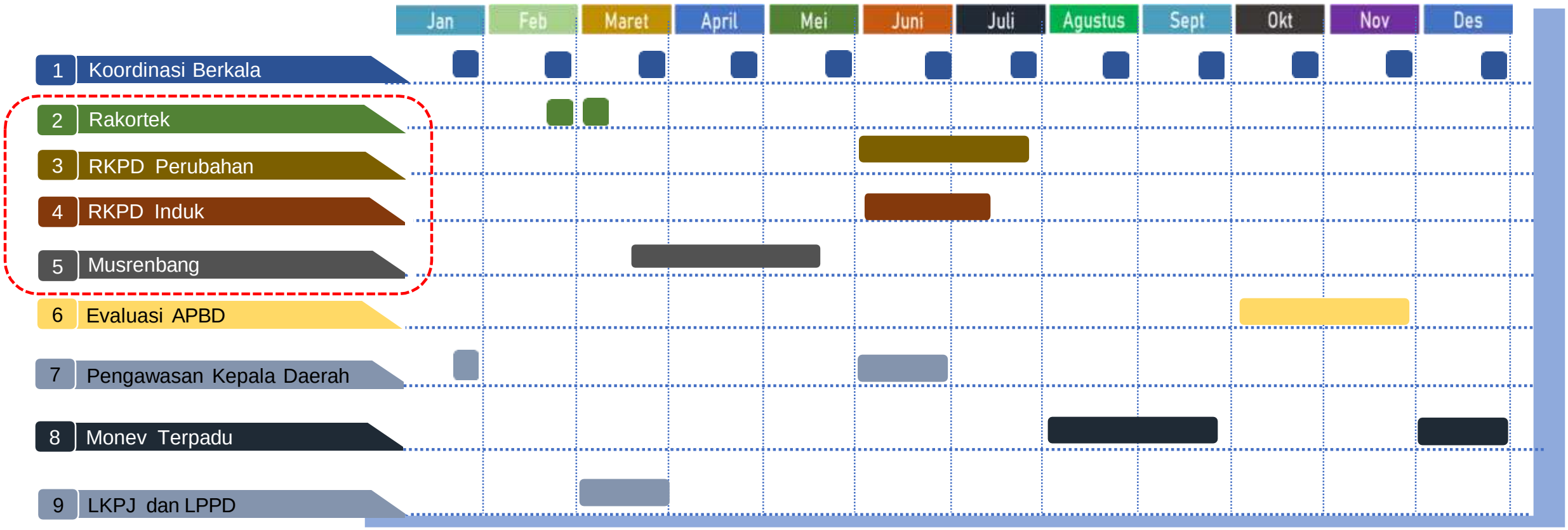


CATATAN:

**Rakortek**
Forum penyepakatan dukungan daerah terhadap target nasional termasuk ProSN

**RKPD Perubahan**
Penyesuaian kebijakan daerah dengan target ProSN

**RKPD Induk**
Penyesuaian kebijakan Tahunan daerah dengan kebijakan tahunan nasional terutama ProSN

**Musrenbang**
Penyampaian kebijakan nasional yang harus didukung daerah dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

# TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN/BELANJA APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2025-2026

## TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2025-2026

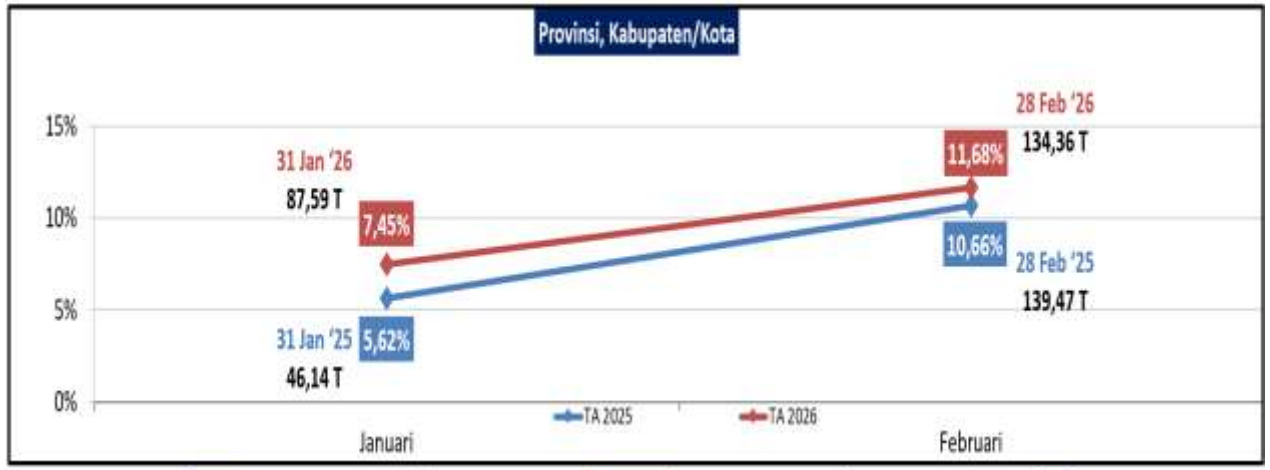


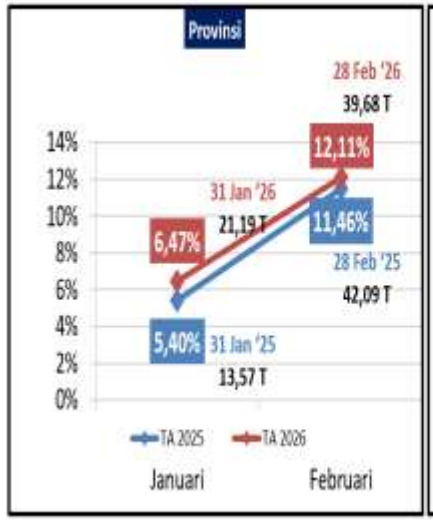


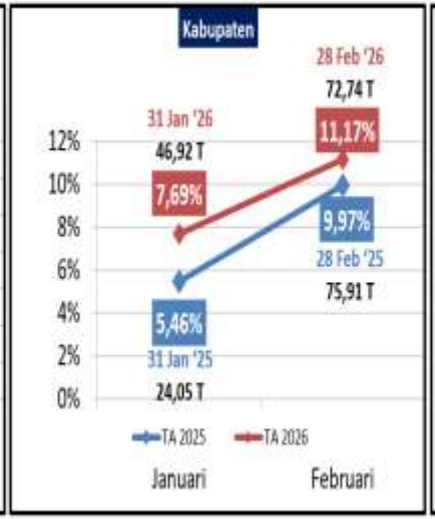


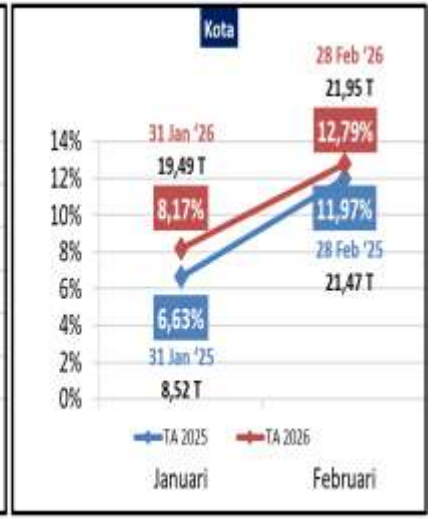


## TREN PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2025-2026

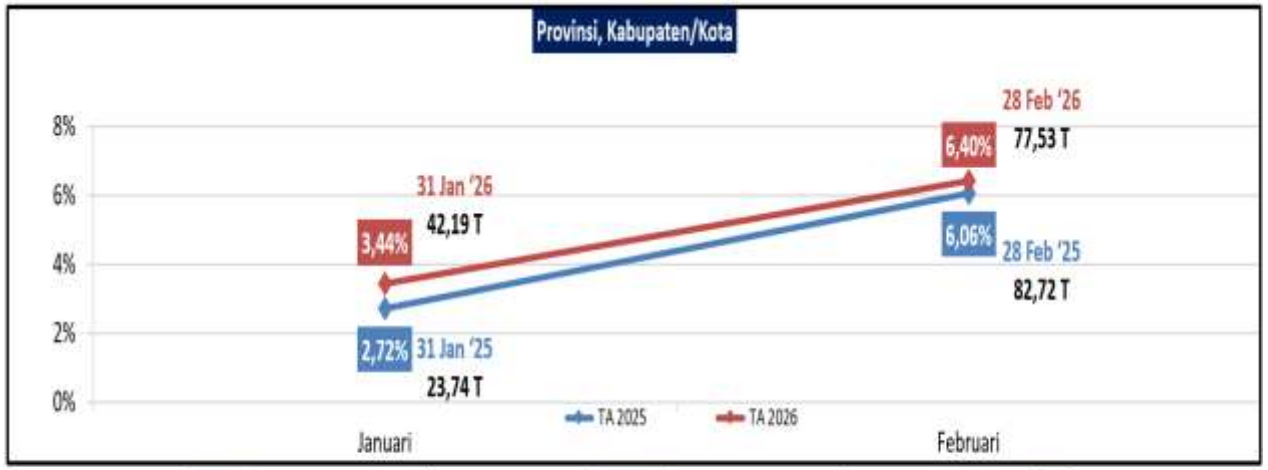


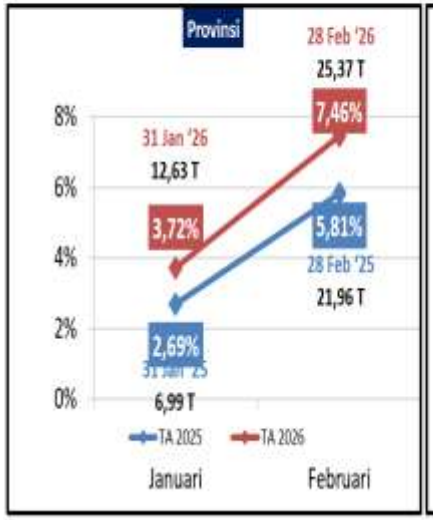


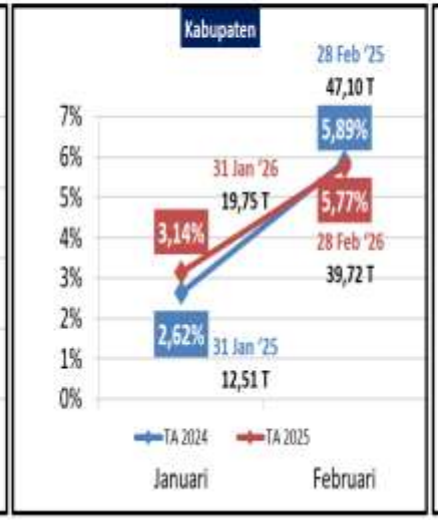


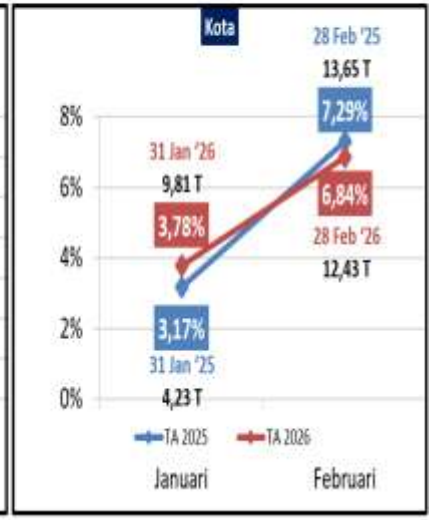

# PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
# APBD PROVINSI DAN KAB/KOTA SE-INDONESIA TA 2026

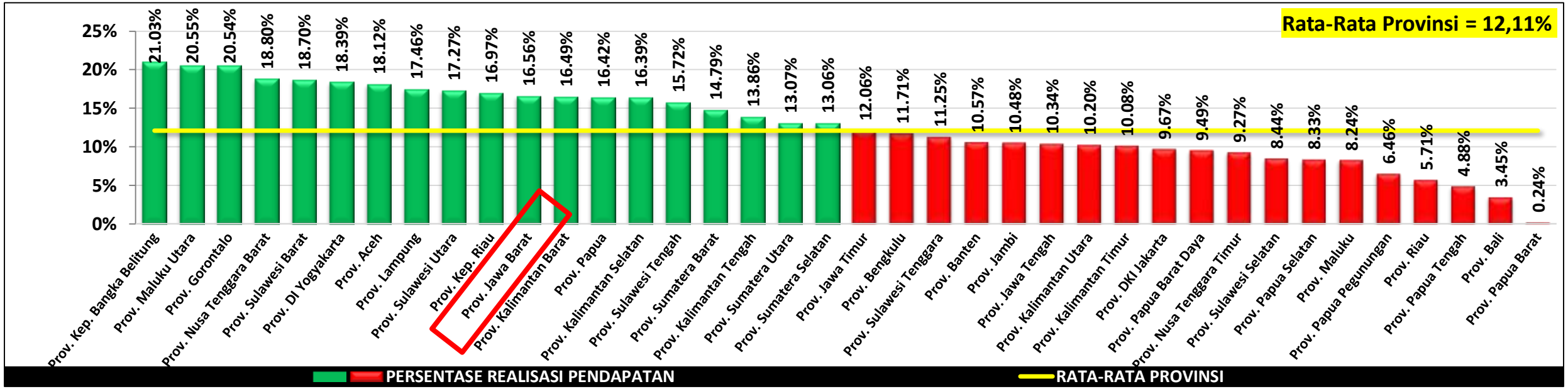


## PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
## APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2026

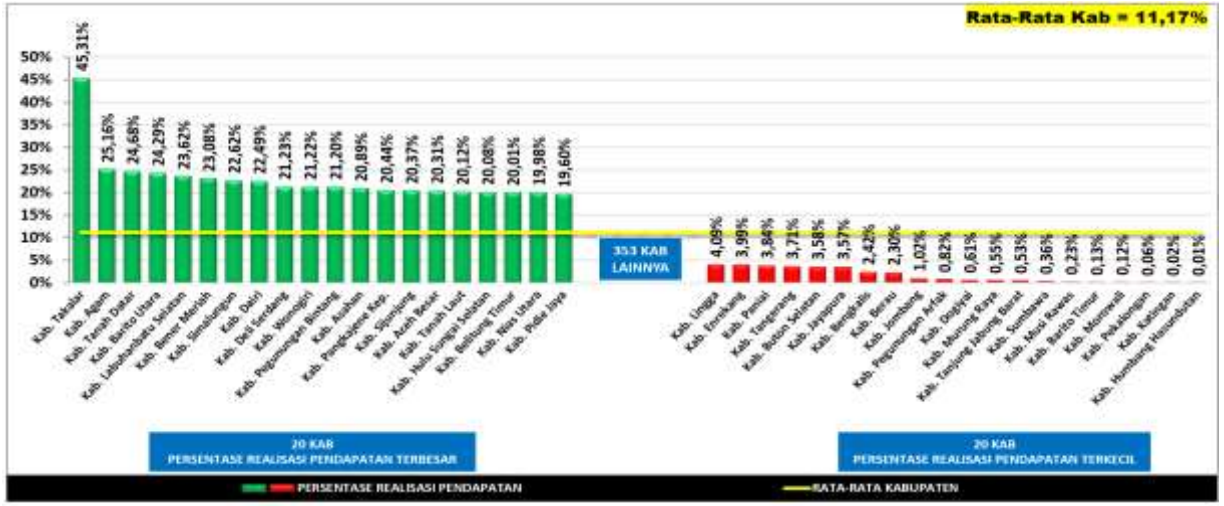


## PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
## APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2026

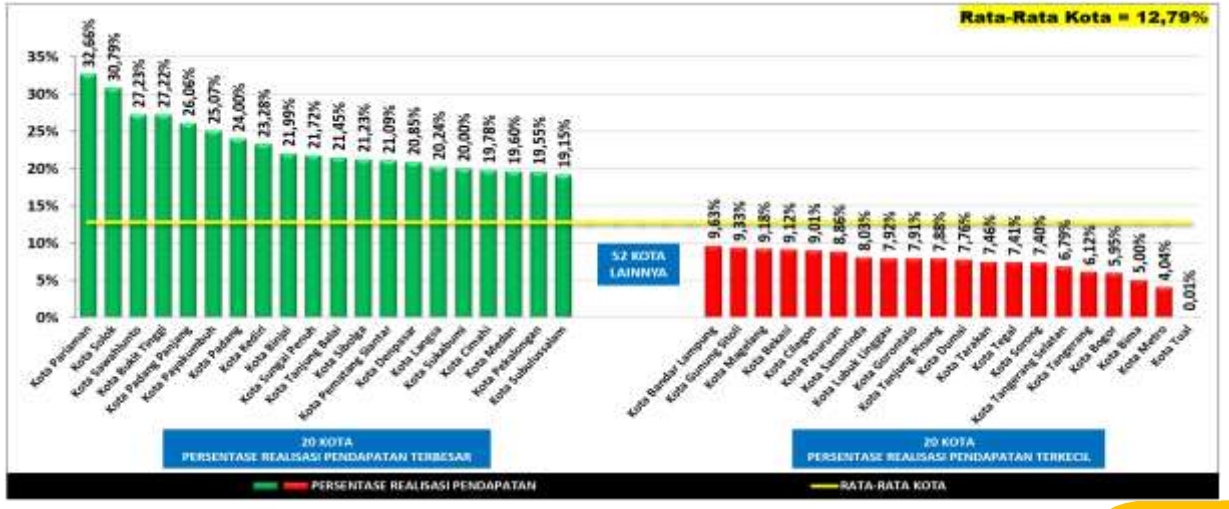

# PERSENTASE REALISASI BELANJA
# APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2026

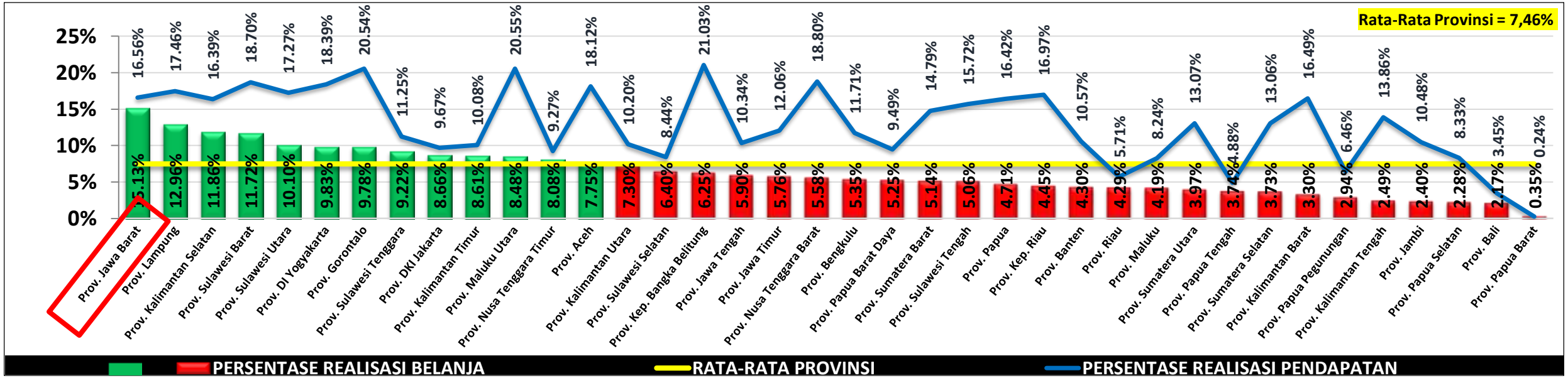


# PERSENTASE REALISASI BELANJA
# APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2026

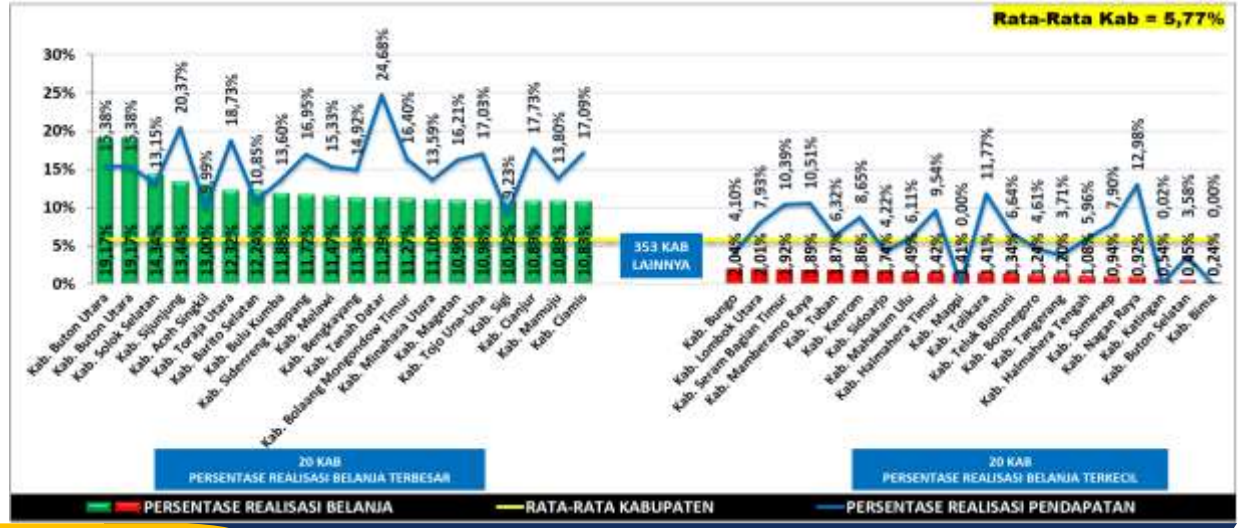


# PERSENTASE REALISASI BELANJA
# APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2026

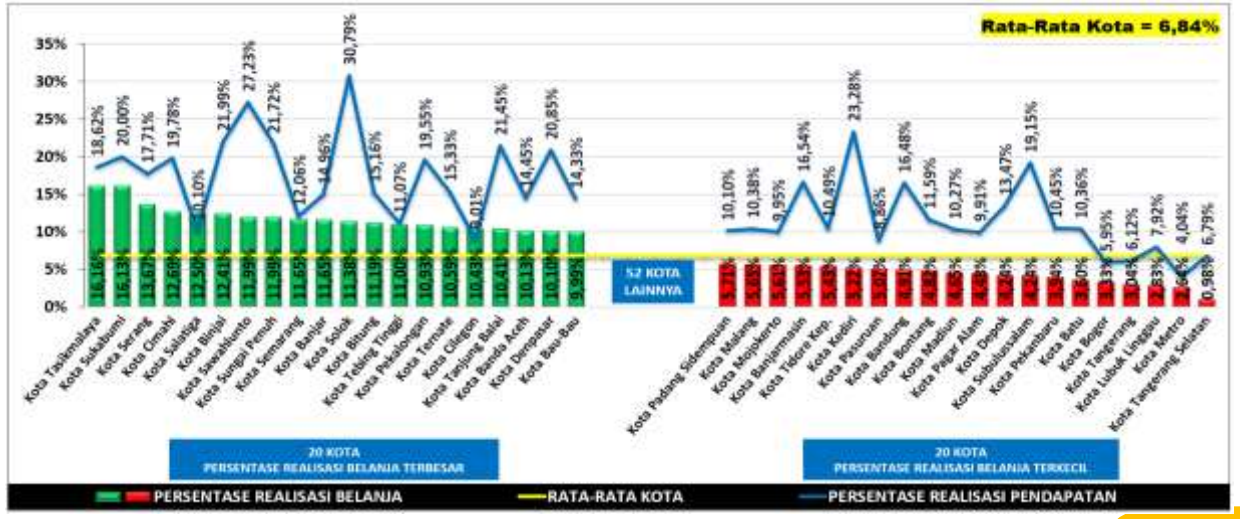

# RAPOR TRANSPARANSI & PENCEGAHAN KORUPSI: CAPAIAN **MCSP JAWA BARAT 2025**

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

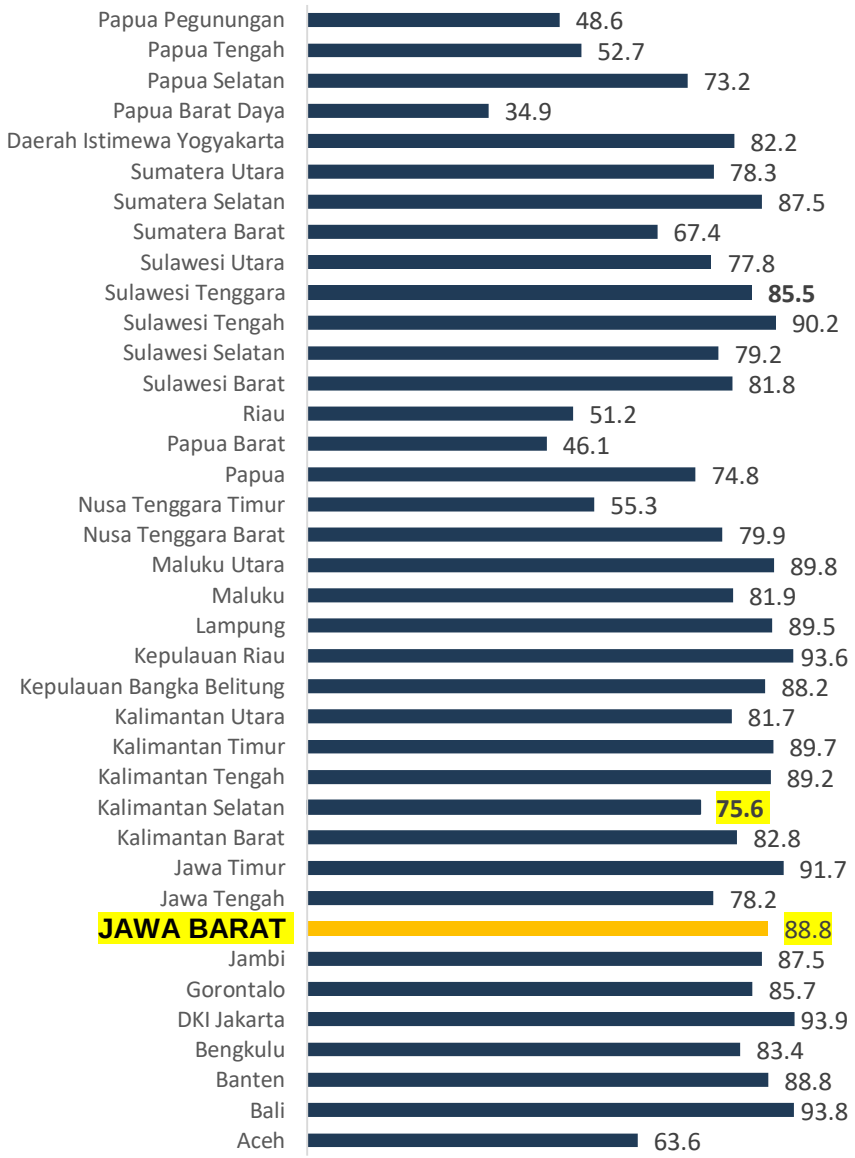


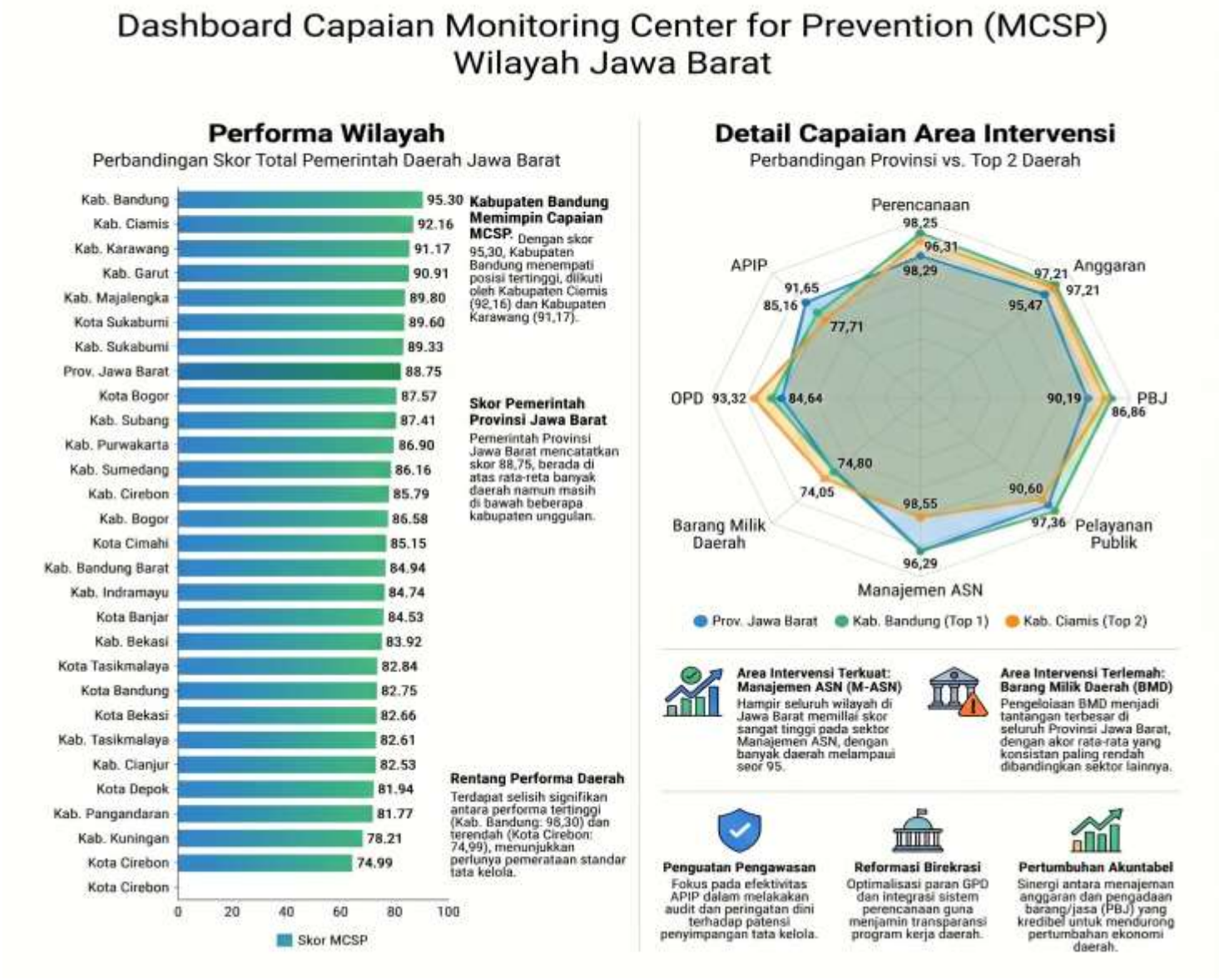


Sumber : jaga.id

*Sumber : Diolah (jaga.id)*

# PENUTUP

# ARAHAN PENYUSUNAN RKPD JAWA BARAT TAHUN 2027

1. Tahun 2027 menjadi paruh waktu pelaksanaan RPJMD Jawa Barat Tahun 2025-2029, sehingga RKPD Tahun 2027 menjadi indikasi yang menentukan ketercapaian atau ketidaktercapaian visi RPJMD. Oleh karenanya konsistensi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah (janji gubernur dan wagub) agar lebih diintensifkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan tujuan RPJMD.
2. Penetapan prioritas pembangunan daerah, seyogyanya dapat tercermin pada kondisi capaian kinerja terakhir (2025) dan penguatan target pada IKU dan IKD yang berkaitan pada tahun 2027.
3. Disarankan agar penyajian gambaran umum berdasarkan 4 aspek pembangunan dapat lebih mengetengahkan capaian IKU, dan IKD atau capaian tujuan dan sasaran dalam konteks capaian RPJMD. Data-data kondisi dan eksisting, serta capaian *output* dan *outcome*, seyogyanya cukup dieksplorasi dalam Renstra ataupun Renja PD.
4. Pada saat penyusunan Rancangan RKPD diharapkan sudah menggunakan data capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025. Kesediaan data terakhir sebelum tahun 2025 agar dinyatakan secara jelas beserta sumbernya. Apabila telah menjadi bagian dalam data statistik sektoral daerah (DSSD), maka seyogyanya menyebutkan sumber data SIPD.
5. Agar Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2027 dapat mencantumkan capaian Tahun 2025 (*baseline*), serta menambahkan target Tahun 2026.
6. Agar Tabel Penjabaran Program Prioritas Tahun 2027 dapat dilengkapi dengan subkegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh perangkat daerah terutama yang bersifat layanan.
7. Diharapkan agar Arahan Per Wilayah Pengembangan, merupakan arahan kebijakan yang akan dijalankan Tahun 2027 dan diberikan arahan dari sisi pelaksana, tata kelola atau strategi pelaksanaannya.

# SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. **Pemerintah Daerah memanfaatkan Musrenbang RKPD Tahun 2027 untuk menampung berbagai masukan dari Pemangku Kepentingan** termasuk DPRD dan masyarakat secara luas dalam rangka mempertajam substansi perencanaan strategis yang dirumuskan, untuk dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyempurnaan menjadi Rancangan RKPD Tahun 2027.
2. **Mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah.** Pengoptimalan pengelolaan potensi unggulan daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.
3. **Memastikan penyusunan RKPD Tahun 2027 secara nyata mendukung dan berkontribusi** terhadap Program Strategis Nasional, Tematik Pembangunan, *Outcome* Prioritas penyelenggaraan PD, dan Ditektif Pemerintah.
4. **Pemerintah Daerah agar memastikan bahwa substansi RKPD 2027 selaras** dengan RPJMD Tahun 2025–2029, Rancangan RKP Tahun 2027, dan **memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional** sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi, keselarasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah.

# TERIMAKASIH

## Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata,
Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750